



**SEMINAR SEJARAH LOKAL**

# **KONSEPTUAL**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH  
NASIONAL**

**1983**

**MILIK DEPKIBUD  
TIDAK DIPERDAGANGKAN**



**SEMINAR SEJARAH LOKAL**

# **KONSEPTUAL**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH  
NASIONAL  
1983**

**Penyunting :**  
**Drs. Anhar Gonggong**

## DAFTAR ISI

	Hal.
Sambutan DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL .....	i.
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN P & K .....	v.
SEJARAH LOKAL, KESADARAN SEJARAH DAN INTEGRASI NASIONAL. Oleh : Taufik Abdullah ..	1.
SEJARAH LOKAL : TANTANGAN DAN HARAPAN. Oleh : Muchlis .....	15.
SEJARAH LOKAL DALAM KURIKULUM UNIVERSITAS, Sebuah Catatan Ringkas. Oleh : T. Ibrahim Alfian .....	29.
KOTA SEBAGAI BIDANG KAJIAN SEJARAH. Oleh : Kuntowjioyo .....	33.
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....	
DAFTAR PESERTA--PEMBAWA MAKALAH .....	
DAFTAR PENINJAU SEMINAR SEJARAH LOKAL .....	
LAPORAN PANITIA PENGARAH SEMINAR SEJARAH LOKAL DI DENPASAR .....	

# SAMBUTAN DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI KEBUDAYAAN

## ARTI PENTINGNYA SEJARAH LOKAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

### PENGANTAR

Seorang tokoh Antropologi yaitu A. Montagu menyatakan bahwa manusia sebagai salah satu bentuk kehidupan berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena ia telah mampu mengarungi *adaptive zone* atau arena adaptasi secara aktif. Kemampuan manusia mengarungi arena adaptasi itu merupakan perwujudan betapa keunggulan manusia dalam menanggapi lingkungannya dalam arti luas serta segala tantangan yang dihadapi itu telah mendorong untuk belajar, menciptakan dan menyampaikan diri dengan mengembangkan kebudayaan yang tidak hanya mempermudah kehidupan tetapi yang pada gilirannya sebagai lingkungan buatan yang baru menguasai tingkah laku manusia. Demikian manusia berhasil membina dirinya dengan menanggapi lingkungannya secara aktif, mencoba memahaminya sebelum menentukan sikap dan berbuat.

Keberhasilan manusia mengarungi *adaptive zone* itu dimungkinkan karena kemampuannya untuk belajar dan mengajar atau menyampaikan pengalaman, pengetahuan dan ide-ideanya kepada sesamanya baik yang hidup segenerasi maupun yang hidup dalam generasi yang berlainan. Kemampuan manusia untuk belajar dan mengajar itu merupakan faktor yang amat penting dalam perwujudan kebudayaan. Oleh karena itu sejarah kehidupan manusia pada hakekatnya merupakan pelajaran yang harus difahami oleh setiap orang yang ingin hidup bermasyarakat secara baik.

Di dalam proses belajar dan mengajar itu manusia tidak membatasi ruang maupun lingkup waktu, Di manapun manusia hidup ia akan mengejar pengetahuan, mencari pengalaman dan mengembangkan idea-ideanya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat serta kemampuan perorangan maupun masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi lingkup pengetahuan yang diserapnya tidak terbatas pada apa yang tersedia di tempat dan dialami sendiri di suatu-waktu. Manusia dengan kemampuannya mengembangkan dan menggunakan lambang-lambang dapat memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, pengalaman dan gagasan mereka secara intra generasi maupun inter generasi. Karena itulah maka pengetahuan manusia bersipat

akumulatif semakin lama semakin bertimbun dan diperkaya oleh pengetahuan yang diwarisi dari generasi terdahulu maupun dengan apa yang mereka peroleh sendiri selama hidupnya.

## SEJARAH

Berdasarkan kenyataan itu, dengan tepat pula A. Montagu menyatakan bahwa "Manusia telah menciptakan hari depannya melalui karya-karyanya hari ini atas dasar apa yang telah diperbuat di masa lampau". Berpegang pada pernyataan tersebut, maka segala peristiwa dan kejadian di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat manusia menjadi penting artinya sebagai pedoman di masa kini serta pengarah di masa mendatang.

Sejarah sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan dalam arti luas (termasuk segala tantangan yang dihadapi) merupakan cermin yang tidak hanya memantulkan wajah kemanusiaan di masa lampau, melainkan mengandung kekuatan inperatif terhadap orang yang mau bercermin untuk berbuat atau tidak berbuat. Pada gilirannya sikap dan tindakan atas dasar pengalaman sejarah itu akan mempengaruhi hari depan manusia yang bersangkutan.

## SEJARAH LOKAL

Berkaitan dengan kehidupan sosial bangsa Indoensia yang sedang membangun, kedudukan dan peranan sejarah amat penting. Pengetahuan sejarah amat diperlukan bukan sekedar sebagai sumber pengetahuan yang inspiratif, akan tetapi juga sebagai pedoman untuk berkarya di hari kini serta menciptakan hari depan sesuai dengan cita-cita serta nilai-nilai Pancasila yang telah sama-sama kita sepakati.

Arti pentingnya sejarah bagi masyarakat Indonesia itu menjadi lebih kuat kalau diingat bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan latar belakang kebudayaan, kemasyarakatan, keagamaan dan sejarah yang beraneka ragam. Penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan masyarakat mejemuk merupakan pekerjaan yang tidak ringan dan harus diselenggarakan dengan seksama. Ia memerlukan kesabaran, ketekunan dan penuh pengertian baik di antara penyelenggara pemerintahan maupun anggota masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan data dan informasi yang memadai tentang kebudayaan dan kemasyarakatan Indonesia baik untuk kepentingan penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya maupun untuk memperluas cakrawala masyarakat tentang negara dan bangsanya.

Mengingat kenyataan akan masyarakat Indonesia yang tersebar luas di kepulauan Nusantara dengan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang beraneka ragam itu, maka pengetahuan sejarah yang diperlukan tidak terbatas pada apa yang terjadi secara nasional, melainkan juga apa yang terjadi secara lokal, yang justru selama ini kurang mendapat perhatian secara mendalam. Sejarah lokal yang benar-benar merupakan kejadian setempat maupun sejarah lokal sebagai kejadian setempat yang mempunyai kaitan secara nasional mempunyai kedudukan dan peranan informan, inspiratif, dan impiratif yang sama pentingnya dalam usaha memahami masa lampau, menghayati masa kini dan merencanakan masa depan bangsa karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia itu bersifat Bhineka Tunggal Ika.

### **TUJUAN SEMINAR**

Atas dasar pernyataan dan kenyataan itulah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Seminar Sejarah Lokal yang sebentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Panitia, tujuan seminar ini antara lain ialah hendak mengundang perhatian para cendekiawan, khususnya sejarawan, untuk memberikan perhatian pada peristiwa yang terjadi setempat (lokal) bukan untuk menonjolkan rasa kedaerahan yang sempit melainkan justru untuk mengungkapkan kesadaran sejarah sebagai satu bangsa yang teguh pendiriannya serta kuat berpegang pada cita-cita kemerdekaan sebagaimana tersimpul dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya dengan segala hormat kita nantikan pengarahan Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan agar seminar mencapai hasil yang memadai dan bermanfaat bagi negara dan bangsa sesuai dengan dana yang disediakan, menggunakan waktu dan pemusatan pemikiran para peserta yang telah dicurahkan untuk keperluan ini.

**Dirrektor Sejarah Dan Nilai Tradisional  
Direktorat Jenderal Kebudayaan,**

**Dr. S. Budhisantoso.**

## PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN P DAN K

Dalam kehidupan budaya nasional, sejarah bangsa wajar kita beri tempat berprioritas tinggi, Sejarah bangsa itulah, yang justru mempersatukan semua individu sebagai unsur bangsa kita, yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sambil mempertahankan pula kepribadian sendiri, identitas budaya, sebagai ciri khas kebangsaannya.

Memang ciri khas kebangsaannya itu yang mampu mengangkat suatu bangsa menjadi subyek sejarah, karena justru kepribadiannya sendiri sanggup membuat sejarah bangsanya. Atas dasar ciri khas dan sejarah itu pun suatu bangsa dapat dinilai dalam tingkatan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lain.

Sebagai bangsa yang berhasil mencapai kemerdekaannya atas kekuatan sendiri, sewajarnya kita merasa berkewajiban untuk mempelajari sejarah nasional kita dengan seksama. Perang Kemerdekaan dan semua peristiwa yang menuju ke tercapainya kedaulatan bangsa kita banggakan dan perhatian sebagai unsur sejarah nasional yang paling menonjol. Seperti saya sebutkan tadi, hal itu wajar.

Namun demikian, riwayat serta keadaan kita sebagai bangsa, kita sadari pula sebagai bukan hanya meliputi saat kehidupan bangsa dalam jangkauan nasional. Sejarah bangsa secara nasional baru bisa diperhitungkan nilai, dan dalam kaitan, kemerdekaan bangsa sejak 1945. Akan tetapi, kita ketahui semua betapa jauh sebelumnya bangsa kita sudah hidup di wilayah ini, sekalipun, memang, belum dalam kaitan nasional sebagai satu bangsa yang berdaulat di seluruh wilayahnya, namun masih dalam batasan suku bangsa dan daerah masing-masing. Walaupun demikian, dalam batasan itu pun, kita ketahui bangsa kita telah mampu juga membuat sejarah. Hal ini cukup terbukti dari aneka macam berita kesejarahan, yang telah beredar, sejak awal sekali tentang wilayah kita, dan yang timbul baik di luar maupun di dalam daerah bersangkutan, meliputi, tidak jarang pula, kepentingan bagian besar, bahkan keseluruhan wilayah kita.

Maka dapat dikatakan, bahwa di bidang sejarahpun keadaan bangsa kita tepat sesuai dengan lambang negara yang telah kita pilih : Bhinneka Tunggal Ika. Jelas pula, bahwa dalam mempelajari dan meneliti sejarah bangsa kitapun berkepentingan dengan menelaah kedua aspek bangsa, ialah ke-bhinneka-an, maupun ke-tunggal-annya.

Di bidang sejarah hal itu dengan sendirinya berarti, bahwa di samping sejarah yang berjangkauan nasional dan meliputi bangsa Indonesia secara menyeluruh serta sebagai bangsa berdaulat, kitapun mempelajari dan meneliti sejarah yang terjadi pada masing-masing sukubangsa kita dan di masing-masing sukubangsa kita dan di masing-masing daerah. Sejarah jenis itulah yang kita sebut dengan istilah teknis sejarah lokal dan yang sekarang ini kita jadikan pokok seminar.

Ingin saya garisbawahi di sini, bahwa dalam sejarah lokal itupun tampak jelas kaitan dengan keadaan sosial-budaya bangsa kita seperti telah disebutkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah dalam sejarah lokal itupun kita hadapi kedua aspek bangsa :

- 1; Aspek bhinneka, yaitu sejarah lokal yang meliputi peristiwa-peristiwa terbatas dalam hubungan kehidupan masing-masing sukubangsa atau daerah.
2. Aspek tunggal ika, yaitu sejarah lokal yang, sekalipun menyangkut peristiwa di daerah atau pada sukubangsa tertentu, namun memiliki kaitan dengan peristiwa sejarah yang berjangkauan nasional, atau yang kejadiannya telah didasari pemikiran yang berjangkauan nasional.

Kedua aspek sejarah lokal itu sama pentingnya apabila dinilai dari sudut ilmiah, Maka kedua aspek itu pula berhak dan perlu diperhatikan dan diteliti secara ilmiah.

Namun demikian, ingin saya tegaskan, bahwa ilmu beserta penelitiannya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia secara keseluruhan. Maksudnya, sebagai sarjana dan ilmiawan, dalam pekerjaan yang betapa ilmiahnyapun sifatnya, kita tidak mungkin melepaskan diri dari tanggung jawab kita sebagai manusia, termasuk tanggung jawab sebagai manusia Indonesia yang hidup di dalam perbatasan negara Indonesia dan dalam hubungan erat dengan bangsa Indonesia itu.

Hal ini saya anggap sangat penting dan hendaknya dijadikan pegangan dalam kehidupan ilmiah kita. Sejarah, lagi pula, termasuk bidang sosial budaya. Dan, sebagaimana kita ketahui, penelitian di bidang sosial-budaya di Indonesia tidak jarang

mengandung bahaya dapat menjerumuskan peneliti yang kurang berpengalaman dan waspada, dalam mempertajamkan unsur bhinneka bangsa, keaneka-ragaman dan perbedaan-perbedaannya, dengan melupakan kaitannya dengan keadaan tunggal bangsa, yaitu dasar budaya yang diketahui memang sama serta tujuan kita untuk membina kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bernegara.

Dalam usaha kita meningkatkan kesadaran bersejarah secara umum dan dalam penelitian sejarah lokal secara khusus, kita tidak ingin membangkitkan justru rasa kedaerahan atau kesukuan yang sempit.

Perhatian kita untuk ke aneka-ragaman, ke-bhineka-an bangsa, bukan bertujuan memisah-misahkan dan memecah-belah. Unsur bhinneka bangsa kita perhatikan untuk dapat menyajikan pilihan guna memberi nuansa, variasi warna-warni yang menarik dalam pengembangan kebudayaan nasional, namun dengan tetap berpijak pada kesamaan dasar yang memang ada serta mengarah ke kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai dengan prinsip Wawasan Nusantara.

Untuk bidang sejarah lokal secara khusus hal itu berarti, bahwa yang hendaknya ditekankan dalam perhatian kita ialah kesamaan dan kebersamaan dalam sejarah kita sebagai satu bangsa yang memiliki dasar budaya yang sama, memakai bahasa daerah yang semuanya termasuk rumpun bahasa yang sama dan yang hidup dalam wilayah yang sama serta telah sepakat membangun negara kesatuan dalam persatuan. Artinya, yang ditekankan bukan justru keaneka ragaman pengalaman sejarah yang dapat merusak rasa kesatuan, memecah-belah bangsa dan mempengaruhi kita untuk berpikiran kedaerahan atau kesukuan secara sempit.

Di samping itu saya merasa perlu pula mengingatkan di sini; bahwa sejarah merupakan ilmu, sehingga berkembang terus seperti ilmu-ilmu lain. Dan sebagaimana layaknya suatu ilmu, setiap penemuan dalam penelitian tentu tidak pernah mungkin dapat dianggap sebagai tuntas secara mutlak, sekalipun peneliti bersangkutan sendiri. dalam antusiasme bekerja, kadang-kadang cenderung merasa telah mendapatkan sesuatu yang sefinal-finalnya. Hal ini memang sering menjadi masalah. Masyarakat awam acapkali kurang memahami sifat ilmu, yang dalam perkembangannya selamanya bisa berubah, mengikuti terungkapkannya data yang tersedia dan yang juga selalu bisa bertambah-tambah. Demikianlah setiap ilmu berkembang tanpa henti-hentinya, tidak ada data yang dapat dianggap memberi jawaban yang mutlak final.

Maka jelas kiranya, bahwa dalam pengungkapan hasil penelitian kita perlu bersikap hati-hati dan bijaksana. Tanggungjawab sebagai sarjana dan ilmiawan memang dengan sendirinya menuntut sikap berhati-hati dan bijaksana itu, karena justru sarjana dan ilmiawan selalu sadar akan relatif-nya setiap penemuan.

Selanjutnya, ingin saya tegaskan kembali, bahwa sejarawan sebagai sarjana dan ilmiawan pula, memikul tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia, anggota masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia, sehingga perlu tetap menyadari tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu membina kesatuan dan persatuan. Penyebarluasan penemuan dan hasil penelitian yang bagaimana juga tidak dapat dianggap tuntas secara mutlak, dan yang mungkin bisa menimbulkan salah tafsir, salah paham, hendaknya dibatasi pada para ahli saja, yang mampu mengevaluasi relativitasnya dan mengerti sangkut-paut ilmiahnya, bukan diedarkan untuk konsumsi masyarakat luas yang awam dan tidak terdidik dalam konvensi ilmiah secara umum dan ilmu sejarah secara khusus.

Dengan harapan, bahwa seminar ini akan berhasil meningkatkan kemampuan ilmiah, memperdalam kesadaran sejarah dan juga memperkuat tanggungjawab kita kepada negara dan bangsa, saya buka Seminar Sejarah Lokal secara resmi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi sekalian usaha baik kita.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio

## B A B I

### SEJARAH LOKAL, KESADARAN SEJARAH DAN INTEGRASI NASIONAL

Oleh: Taufik Abdullah

#### I

Malam tanggal 25 Agustus 1916 di Muara Tembesi (Jambi) sekelompok perusuh menyerang pos polisi dan rumah-rumah pejabat. Muara Tembesi jatuh ke tangan mereka. Besok harinya pemimpin dari para perusuh mengumumkan bahwa siapa-siapa yang ikut mereka akan mendapat rahmat dan siapa-siapa yang menolak akan diperlakukan sebagai musuh. Apa artinya perlakuan sebagai musuh, peristiwa yang menimpa para polisi telah cukup berbicara.

Pemimpin perusuh itu menamakan dirinya "Raden Gunawan" atau, boleh juga "Raja Raden Gunawan". Tentu saja ini bukanlah nama ciptaan, tetapi nama tokoh Sarekat Islam dari Jawa Barat, yang beberapa bulan sebelumnya melakukan perjalanan propaganda ke Jambi. Meskipun diselidiki kemudian memperlihatkan bahwa ia dan S.I. tak ada hubungan dengan peristiwa ini, pemakaian namanya memperlihatkan bahwa Raden Gunawan dikagumi. Dua hari setelah peristiwa penyerangan itu "Raden Gunawan" mengadakan upacara "kerajaan", dengan meletakkan dua payung di atas kepalanya ia mengumumkan bahwa ia adalah "Sultan Taha". Sedangkan putra mahkotanya, yang sebelumnya telah pula dinamakan "Raden Gunawan", mulai saat itu harus disebut "Sultan Sri Maharaja Batu". Sedangkan wakilnya, kini harus disebut "Raden Gunawan". Tetapi kemudian "Raden Gunawan" yang baru ini, harus pula disebut "Pangeran Ratu".

Peristiwa Muara Tembesi adalah yang terhebat, terlama dan terbanyak memakan korban. Tetapi bukanlah satu-satunya peristiwa yang terjadi dalam waktu yang bersamaan di daerah Jambi --- residensi yang baru sembilan tahun sebelumnya (1907) secara resmi kehilangan kesultannya. Di berbagai tempat itu banyak pemimpin yang menyebut diri mereka "Raden Gunawan" ataupun nama lain yang serba hebat, "Raja Islam", atau apa saja. Tetapi kasus di Muara Tembesi menarik juga. Jika Raden Gunawan adalah nama tokoh kontemporer yang rupanya sangat dikagumi, maka Sultan Taha adalah raja yang di tahun 1858 dimaksudkan oleh pemerintah kolonial

dan yang sampai meninggalnya (di tahun 1904) terus melanjutkan penentangannya terhadap dominasi Belanda. Sedangkan Sultan Sri Maharaja Batu adalah putera mahkota atau **Pangeran Ratu**, yang syah, di akhir abad 17, yang disingkirkan Belanda. Ketika Sultan yang sedang memerintah ditangkap dan dibuang, karena dituduh ikut terlibat dalam pembakaran **facto-rij** di Jambi. Ia, seperti juga kemudian Sultan Taha, menyingkir ke sekitar Muara Tembesi, di daerah Bangsa XII, dan mendirikan kratonnya di sana. Didukung oleh para migran dari Minangkabau dan dengan dukungan "raja" Pagaruyung, Sultan Sri Maharaja Batu (juga disebut Sultan Sri Ingalogo) melawan Sultan yang didukung VOC, yang berkedudukan di Tanah Pilih, ibukota Jambi. Pangeran Ratu yang terakhir adalah putera Sultan Taha, yang ditangkap di tahun 1906, karena terlibat dalam suatu plot (1904) dengan seorang kolonel Turki yang palsu untuk mengembalikan kekuasaan Sultan Jambi yang telah pudar.

Persamaan dari kesemua tokoh ini ialah bahwa mereka dalam zamannya masing-masing bukan saja pemangku kedudukan kekuasaan yang sah menurut tradisi, tetapi juga penentang dari kekuasaan baru yang didukung oleh Belanda. Dalam peristiwa Muara Tembesi kesemuanya diingat dan kesemuanya dihidupkan kembali. Mereka tidaklah sekedar dikenang, tetapi dijadikan "ada". Kelampauan mereka dijadikan tak berarti. Mereka adalah "kini". Mereka adalah di sini. Batas waktu menjadi mencair --- tidak, bukan menjadi --- tetapi memang tak begitulah sejak semulanya. Semuanya terlarut dalam apa yang disebut Cassirer "waktu mitologis", yang tanpa batas, "tak berwaktu", tanpa mempunyai struktur yang jelas.

Ketika dunia yang wajar dirasakan tak lagi berfungsi, maka lapisan-lapisan waktu itu hanyalah seperti slide-slide yang terpisah-pisah --- bukannya sesuatu yang kontinum --- bertumpuk menjadi satu. Penumpukan waktu itu bukan saja berfungsi dalam mewujudkan tindakan keras dalam renafian dunia yang tak wajar itu, tetapi juga dianggap sebagai pengembalian keutuhan kosmos yang telah terganggu.

Dalam situasi kelampauan tidak bisa dianggap sebagai contoh bagi hari kini. Contoh hanya mungkin jika jarak telah terjadi. Jadi yang lampau itulah yang harus selalu menghimpitkan dirinya di atas dunia pengalaman yang terus mengalir ini.

Yang menjadi sasaran sejarah, kata Wood, bukanlah peristiwa, tetapi perbuatan, yaitu "willed event", peristiwa yang di-

sengaja. Mungkin ia benar juga, jika sejarah dijadikan sebagai sesuatu harus dipelajari; jika perbedaan *histoire-realite'* harus jelas dibedakan dengan *histoire-re'cite'*. Namun dalam konteks sejarah sebagai sesuatu yang dihayati, dihirup, maka **willed-event** bisa berarti pengikaran atas keharusan abadinya ketertiban kosmik.

Keabsahan **willed-event** tidaklah secara intrinsik terpaut dalam dirinya, tetapi ditentukan oleh kesesuaiannya dengan totalitas. Secara konseptual, jika tidak dalam realita maka kebebasan adalah ketidakmungkinan. Perbuatan yang merupakan peristiwa yang disengaja itu, telah ditentukan oleh suatu keharusan, *necessity*, yang terpaut dalam totalitas yang kosmis itu.

Dalam konteks pemikiran akan keutuhan kosmis dengan sistem perbuatan ini, barangkali ada benarnya mengingat apa yang dikatakan seseorang. Biarlah para filosof merenung makna sejarah, tetapi "kita" harus berbuat terhadapnya. Tanpa harus memfilsafatkannya, tampaknya inilah yang terjadi. Mereka, para petani di Muara Tembesi, atau hampir di mana saja, ketika masyarakat tradisional telah merumuskan dunia mereka yang sah, yang **legitimate**, telah dinodai. Mereka berbuat sesuai dengan tuntutan sejarah --- sesuai dengan tuntutan kehausan akan selalu terwujudnya kemantapan kosmos. Dalam suasana ini memang tiada batas antara kesadaran sejarah dengan kesadaran *methodologis*. Bahkan mencairlah kemungkinan pertentangan keduanya, sebagaimana biasa dikemukakan para ahli filsafat sejarah dari dunia Barat.

Jika demikian halnya dalam hubungan antara kesadaran dengan perbuatan, antara sejarah dengan **willed-event**, maka begitu pulalah corak pemikiran dalam historiografi tradisional umumnya. Seperti beberapa studi telah memperlihatkan, bahwa setidaknya sampai dengan awal abad 19, ketika konsep tarikh yang mengenal waktu, telah mulai berpengaruh, pengaburan waktu juga sangat sekali terasa. Dengan begini setiap peristiwa tidaklah bisa dicari sebabnya pada peristiwa yang mendahului dan tidak pula dapat ditemukan akibatnya pada yang mengikutinya. Hubungan kausalitas dari rentetan peristiwa, yang disebut Walsch, "**colligation**" itu, tidaklah sesuatu yang akan bisa ditemukan. Hubungan kausalitas dimungkinkan dalam kaitan antara perbuatan dengan totalitas. Maka dengan begini kemungkinan ikatan kausal dari peristiwa yang mendahului terletak pada makna moral yang terlekat di dalamnya. Raja yang telah melupakan tata tertib kebangsawanan akan menimbulkan mala-

petaka bagi kerajaan. Jadi kata akhir terletak pada keakraban kosmik.

Kejadian atau peristiwa adalah, seperti halnya dalam kesadaran, slide-slide yang tak terikat dalam untaian apa yang disebut seorang ahli sebagai gaya "hypotactic", tetapi "paratactic". Dengan begini kemungkinan kausalitas logis yang dimunculkan oleh untaian peristiwa yang diuraikan dihindarkan. Dan, dengan begini pula penghadapan terhadap dimensi waktu ditiadakan pula.

Kesadaran sejarah — atau mestikah lebih tepat disebut "ketidak sadaran sejarah kolektif" (**collective historical unconsciousness**) sebagaimana Leff mengatakannya? — yang seperti ini tidaklah sekedar pantulan dari "kelampauan sosial yang telah diresmikan" (seperti kata Hobsbawm) tetapi juga "**struktur kekinian**", yang semestinya harus selalu fungsional. Terlepas dari kemungkinan pemakaiannya sebagai sumber sejarah (dalam pengertian "modern"), historiografi tradisional, sebagai bagian dari perbendaharaan kultural, bukan saja merupakan gambaran dari suatu **Weltanschauung**, di mana tempat diri dalam semesta ditentukan, tetapi juga suatu **myth of concern**. Sebagai hal yang belakangan ini maka yang paling menentukan bukanlah "kepastian" (**certainty**) sejarah, bukanlah ketetapan catatan, tetapi kewajaran (**fairness**)nya bagi keutuhan kosmis.

Dalam gambaran tentang kemantapan kosmis inilah perobahan sosial mewujudkan dirinya dan dalam kemantapan ini pula waktu makin berfungsi. Maka jika revisi terhadap gambaran dunia telah makin tak dimungkinkan dan di saat perlawanan radikal yang bersifat salinlah murni dari pengalaman kultural, makin merupakan suatu kemustahilan, suasana krisis yang hampir total pun tak terhindarkan. Jika sejarah dari historiografi kita akan dikaji, maka ketika inilah berakhirnya zaman para pujangga. Ketika inilah mulai terjadinya kekosongan sejarah lokal dalam pengertian tradisional.

Dalam suasana seperti ini jangankan penumpukan lapisan-lapisan peristiwa yang akan bisa terwujudkan, bahkan kelampauan sebagai model makin tak lagi dimungkinkan. Kelampauan atau pengalaman di masa lalu hanyalah mungkin sebagai petunjuk, sesuatu yang hanya bisa memberikan pola-pola tertentu pula. Jika demikian, tanpa harus lebih dulu menggugah keintiman sejarah, sebagai pantulan dari kesadaran kultural — kalau bukan dikatakan sebagai gambaran dan uraian tentang peristiwa kemanusiaan di waktu lampau -- tuntutan baru ter-

hadap penulisan itu terpaksa diajukan, dan memang telah lama diajukan. Tekanan waktu, yang mewujudkan dirinya dalam berbagai gelombang perubahan struktural, telah makin meniadakan kemungkinan untuk memperlakukannya sebagai slide-slide yang dapat dipertumpukkan. Bahkan slide-slide itu telah makin membuyar dalam kesadaran. Kesemuanya seakan-akan telah menjadi gambar hidup yang bersambungan. Lebih dari pada itu keragaman corak peristiwa, yang disadari atau tidak, bisa pula merupakan "willed-events", sedangkan kompleksitas dari situasi yang menjadi wadahnya serta mata rantai yang mendahului dan menyusulnya, menyebabkan pula bahwa soal kausalitas, logis atau riil, harus dihadapi.

Dengan begini maka corak penulisan sejarah baru diperlukan. Di samping penulisan sejarah yang telah memperlihatkan dengan jelas betapa dunia-dunia lama yang parochial dan tradisional telah harus digantikan oleh dunia baru, yang nasional dan modern, maka diperlukan juga kembali penulisan yang bersifat lokal. Dengan pembatasan ruang lingkup perhatian, bukan saja keakraban yang lebih intim dengan peristiwa-peristiwa bisa diharapkan terjadi, lebih penting lagi ide-ide besar dipertemukan atau dipertentangkan dengan pengetahuan yang serba-detail. Barangkali dalam hal inilah salah satu sumbangan penulisan sejarah lokal yang baru bisa diharapkan pula pikiran besar, atau, dari sudut keilmuan, teori besar, hanya berarti jika ia telah diuji oleh penelitian yang terperinci.

Tetapi, bagaimana? Bukankah dengan begini kita akan bertemu dengan sifat sejarah lokal yang serba utuh pada dirinya? Maka kalau begitu terlepaslah semua dalam ikatan baru yang bersifat nasional.

## II

Salah satu hal yang menarik dari sejarah hubungan Jambi dan Belanda ialah "periodisasi"-nya tampak dengan jelas. Tahap pertama, sejak 1615, ketika *factorij* didirikan, sampai dengan 1880, ketika Sultan Taha (yang dimakzulkan Belanda tahun 1858) secara simbolik menyerahkan keris Siginjai kepada saudaranya, yang telah jadi Sultan, dan keris lain kepada anaknya, yang telah diangkat sebagai Pangeran Ratu. Dengan begini secara simbolik Sultan Taha memperlihatkan zaman kesultanan Jambi dengan dua Sultan harus berakhir. Tetapi, serta merta gerakan perlawanan bertambah menghebat. Dalam suasana inilah penulis-penulis Belanda menyebut adanya "Jambi

Oorlog". Nama-nama yang muncul kemudian adalah para bangsawan. Dengan kata lain, periode ini ditandai dengan munculnya para bangsawan sebagai pengambil inisiatif dalam gerakan perlawanan. Tetapi di tahun 1904 Sultan Taha dan Pangeran Dipo meninggal dunia. Pangeran Ratu di tahun 1906 ditangkap. Raden Mat Tahir tewas. Dan akhirnya 1907 kesultanan dihapuskan.

Dengan begini, seperti telah diuraikan di atas, maka pengambil inisiatif, akhirnya jatuh kepada petani kecil. Fase ketiga telah dimasuki.

Dengan bertolak dari patokan pengambil inisiatif ini setidaknya tiga hal bisa terpenuhi. Pertama, pengenalan yang lebih dekat dengan struktur sosial bisa dilakukan. Kedua, corak dan motivasi reaksi dari kelompok-kelompok sosial terhadap penetrasi asing dengan lebih jelas bisa diperhatikan. Keduanya, tentu saja, akan lebih mungkin menghindarkan peneliti sejarah dari pukul rata yang bisa menyesatkan. Dan dengan begini pula sejarah sebagai dinamik sosial akan lebih memperlihatkan bentuknya. Akhirnya, ketiga, pendekatan ini lebih memberi kemungkinan bagi studi komparatif. Kasus Jambi ternyata tidaklah unik. Kasus ini bahkan memperlihatkan berbagai *traits* yang bisa diperbandingkan dengan pengalaman historis daerah lain.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok dalam pola tindakan dari ketiga golongan sosial di atas — raja, bangsawan, dan petani — dan corak kontak dengan kekuasaan asing yang juga berbeda, ketiganya memperlihatkan persamaan yang penting. Bukan saja keprihatinan kultural sebagai akibat dari telah terjadinya ketidakwajaran dalam tata kosmos, yang dengan jelas sama-sama diperhatikan oleh ketiga golongan itu, tetapi juga corak reaksi menampakkan kesamaan. Reaksi yang muncul hanyalah salinan yang "murni" dari pengalaman kultural. Bahkanlah intervensi asing yang menjadi soal utama, tetapi ketidakwajaran yang harus dihapuskan. Kalau begitu masalah organisasi, pertimbangan kekuatan dan kelemahan musuh dan sebagainya bukanlah terutama yang menjadi perhatian pokok. Ketidakwajaran telah terjadi — kesultanan mempunyai dua Sultan, Sultan yang sah tak menduduki kraton, pajak yang "tak sah" dikutip "orang asing". Inilah yang menjadi keprihatinan utama. Dalam situasi ini pula, bukan saja antara magi dan agama tergabung dalam keutuhan, slide-slide peristiwa kelampauan menemukan keutuhannya. Maka

memang tak perlu heran, umpamanya, para anak raja, bangsawan kraton, bisa terbujuk oleh seorang Yahudi, yang menyamar sebagai kolonel Turki di tahun 1904. Mengapa tidak, bukankah Sultan Taha (1855) telah mengadakan kontak dengan khalifah di Istanbul?

Reaksi sebagai salinan murni dari pengalaman kultural juga bukanlah sesuatu yang unik dari Jambi. Bahkan corak ini, dalam konteks nasional asing, yang diperlihatkan oleh berbagai golongan sosial pada waktu yang kadang-kadang berbeda-beda. Reaksi yang bertolak dari suatu artikulasi pengalaman, ketika situasi dan kesempatan baru yang diperkenalkan oleh kekuasaan asing telah diperhitungkan, barulah tampak ketika organisasi dan partai didirikan dan di saat tujuan perjuangan telah dirumuskan. Dengan begini fase kedua dari sejarah penentangan telah dimasuki. Dalam situasi ini, bukanlah penggolongan atau stratifikasi masyarakat tradisional yang berbicara, tetapi kategori sosial yang telah dimasuki unsur-unsur kekotaan yang makin pluralistik. Tak pula mengherankan bahwa kategori-kategori sosial tersebut lebih cenderung untuk berada sesama mereka. Dalam buku-buku pelajaran sejarah fase ini biasa disebut "kebangkitan nasional".

Secara simbolik begitulah biasa disebut. Tetapi dari sudut realitas sejarah, ia lebih membayangkan kesadaran kategori sosial tertentu dalam konteks masyarakat majemuk yang kolonial. Artikulasi yang lebih lanjut barulah terjadi ketika usaha dan proses identifikasi dari berbagai kategori, yang **primordial**, dan ekonomis itu, mulai terjadi, dan kekuatan serta kelemahan intervensi kekuasaan asing itu mulai diperhitungkan. Dan akhirnya, inilah proses yang menciptakan "bangsa Indonesia", dan dengan begini pula, jalan ke integrasi nasional mulai dirintis.

Apa artinya ini semua? Dari conoth di atas tampaklah bahwa sejarah lokal dengan pendekatan yang tidak bersifat involusi, yang hanya berkisar pada dirinya, makin memberi kemungkinan untuk merintis permasalahan baru dalam sejarah nasional. Dengan begini bukan saja visi tentang proses ke arah terwujudnya kesadaran nasional, sebagai syarat utama bagi kemantapan integrasi nasional, selalu dapat dipersegar, tetapi, dan lebih penting lagi, dinamik sesungguhnya dari proses itu dapat dimengerti. Namier benar juga, ketika ia mengatakan tujuan sejarah (sebagai ilmu) ialah "untuk memahami situasi, mempelajari kecenderungan-kecenderungan, mendapatkan bagaimana segala sesuatu bekerja". Maka, katanya lagi, "hasil yang paling membanggakan dari studi sejarah adalah perasaan

sejarah (**historical sense** -- suatu pengertian yang intuitif bagaimana sesuatu tidak terjadi”.

Dan kesediaan menghadapkan diri kepada hal yang kecil, yang rendah dari sudut kemungkinan generalisasi, seperti yang dilakukan sejarah lokal (apapun batas geografis dan waktu yang akan dikenakan padanya) pemahaman yang lebih jernih tentang situasi dan kecenderungan lebih dimungkinkan untuk tercapai. Dengan pertanyaan akademis yang sesuai -- sesuatu yang sering harus dicari-- maka pemahaman ini akan bisa memberikan sesuatu yang lain, yaitu **historical sense**.

Dengan begini kita sesungguhnya telah berhadapan kembali dengan masalah kesadaran sejarah -- sesuatu yang **immanent** dalam diri dan dalam masyarakat. Maka apa yang pernah ditulis Soedjatmoko menjadi lebih penting. Betapapun besarnya tuntutan terhadap sejarawan untuk memenuhi kebutuhan kultural bangsanya akan simbol-simbol yang sesuai. Betapapun besar godaan agar sejarawan dapat memperkuat pembentukan **mythos** peneguh, setelah periode kolonialisme telah dilalui, akhirnya, katanya, semua itu hanyalah bisa terlaksana jika sejarawan memenuhi tugas dan etik akademis dan intelektualnya yaitu mendapatkan pemahaman tentang dinamik di kelampauan.

Kalau begitu pemupukan kesadaran sejarah -- suatu "**crowning achievement**", kata Namier -- dan peningkatan kesadaran nasional haruslah bersandar pada kesadaran **methodologis** yang tinggi dan kecermatan terhadap detail yang serba **fragmentaris**. Lebih lagi, kesemuanya harus pula didampingi oleh kesediaan untuk selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang **relevant** dan keterbukaan dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan pendekatan. "Kesadaran sejarah", kata Lowith, "hanya bisa bermula dari dirinya sendiri, meskipun tujuannya untuk mengetahui pikiran dari waktu lain dan dari orang lain, yang berbeda dari waktu kita dan diri kita".

Jadi pikiran yang serba-muluk motivasi yang serba-indah, tidaklah akan dapat menjadi dasar dari kesadaran sejarah tanpa pengenalan yang wajar dari dinamik sejarah itu sendiri.

### III

Mungkin Renier agak berlebih-lebihan dengan mengatakan bahwa sejarah "**nothing but a story**". Tetapi bahwa bentuk penyampaian bersifat berceritera, **narrative**, telah merupakan

keistimewaan yang khas sejarah. Bahkan, meskipun berbagai pendekatan telah memasuki ilmu sejarah, mulai dari pendekatan sosiologis, psikonalisis, sampai dengan yang matematis, tampaknya, kata Stone, dengan bangga dan terharu, bentuk "narrative" kembali dengan penuh gairah. Dan berapa orangkah ahli sejarah terkemuka yang dalam penghargaan mereka terhadap keahlian Le Roy Ledurie, tanpa segan-segan mengejeknya ketika ia dengan bangga mengatakan "sejarawan yang akan datang haruslah sekaligus seorang ahli komputer atau tak jadi apa-apa". Jangankan hal ini bisa terjadi, kata mereka, "si Nabi" itu sendiripun tak mengerjakannya. Dan memang pula Mentallou, buku Ledourie yang demikian indah itu, lebih berkisah, meskipun tanpa plot utama, dari pada berhitung-hitung.

"Berceritera" dengan plot utama — maka orang akan mengatakan akan pentingnya **emplotment** dalam penulisan sejarah — ataupun beranalisis yang kering hanyalah sesungguhnya bentuk penyampaian; **mode of discourse**, kata orang. Tetapi memang tampaknya lebih daripada disiplin lain, kepada sejarah lebih dirasakan tuntutan tradisi akan bentuk berkisah. Tampaknya hal ini tidaklah sekedar melanjutkan tradisi historiografis yang menjadikan sejarah haruslah pula dianggap suatu kesenian (**art**), betapapun Bury, dengan penuh kepercayaan diri, yang tinggi mengatakan bahwa sejarah adalah "science", tak lebih dan tak kurang. Masalahnya tampaknya juga terletak pada apakah yang sesungguhnya dipersembahkan sejarah itu — sejarah sebagai *re'cite*? Meskipun sejarah telah melampaui periode historologisnya — setelah sejarah menjadi "sejarah", kata Plum, dan tak lagi "the past", kelampauan, yang telah diwarnai oleh segala asumsi kultural ia tidaklah salinan yang murni dari kenyataan empiris. Tidak, dan tidaklah mungkin. Apa yang sesungguhnya didapatkan ialah yang disebut Cassirer "ideality of recollection" — bentukan baru dari realitas empiris didapatkan. Jika begitu memang berceritera adalah bentuk yang paling sesuai. Menangkap seluruh realitas dalam suatu totalitas adalah hal tak mungkin. Maka dengan berceritalah, realitas itu dijadikan hidup kembali.

Dalam menghadapi bukti-bukti yang serba fragmentaris maka rekonstruksi sejarah hanyalah mungkin dengan imaginasi. Terhadap konsep imaginasi dalam rekonstruksi sejarah ini yang sama sekali tak bisa terpisah dari kebenaran (dari sudut realitas empiris) dan kejujuran (dari sudut sejarawan) berbagai ungkapan telah diajukan. "Imaginasi dari kebenaran realitas", kata Goethe dengan poetis atau "pemahaman yang imaginatif", kata Carr.

Tetapi kesemuanya memperlihatkan bahwa dalam penulisan sejarah selalu terjadi konflik antara kebenaran yang ideal --- kenyataan empiris yang telah mendapatkan bentuk baru --- dengan kebenaran empiris. Dari sudut teori, keduanya berada dalam kandungan sejarah --- sebagaimana --- diceriterakan, bukannya dalam penghadapan antara yang diceriterakan dengan yang terjadi (realite'). Tetapi apa yang benar dalam bentuk yang terjadi (realite'). Tetapi apa yang benar dalam bentuk logika, tidaklah terpenuhi oleh kebenaran empiris. Jadi pertentangan antara kebenaran ideal dengan yang empiris itu selalu ada. Maka adalah tugas sejarawan untuk selalu berusaha mencari perimbangan dari keduanya. Yang "ideal" bukanlah idealisasi dari kebenaran empiris, tetapi representasi dari pandangan.

Justru karena hasrat mendapatkan keseimbangan antara dua kebenaran tersebut, berbagai pendekatan ilmu dan disiplin makin memasuki ilmu sejarah. Dan karena ini pula di samping corak narrative, sejarah analisis akan terus merupakan salah satu bentuk penyampaian studi sejarah.

Apapun pendekatan yang dipakai --- mulai dari rentetan kering peristiwa demi peristiwa sampai dengan apa yang disebut multidimensional --- dan betapapun bentuk penyampaian yang dipergunakan, studi sejarah yang baik haruslah memenuhi dua persyaratan minimum. Pertama ia harus membuat struktur dari totalitas aktivitas manusia. Tanpa ini, bukan saja sejarah hanyalah merupakan samudera peristiwa tanpa bentuk, tetapi juga meniadakan apapun makna yang bisa dipantulkannya. Hanyalah dengan pengenalan sejarah yang intim makna itu bisa didapatkan. Makna sejarah tidaklah segera memperlihatkan dirinya, ia baru kelihatan ketika telah dicari, begitu kira-kira Lowith pernah mengatakan. Kedua, sejarah harus pula menunjukkan kaitan dari berbagai kegiatan manusia itu. Dari sudut disiplin ilmu, hal ini berarti pula bahwa sejarah memperlihatkan ikatan dari berbagai disiplin dalam usaha untuk memahami apa yang disebut Namier "situasi dan kecenderungan". Di samping itu disebut Namier "situasi dan kecenderungan". Di samping itu tak pula kurang pentingnya yang dikatakan Hobsbawm sebagai sumbangan Marx yang penting, ialah hubungan antara perbuatan manusia yang sadar (atau *willed-event*, kalau Wood menyebutnya) dengan perubahan historis yang terlepas dari hasrat manusia.

Dari sudut methodologis hal-hal ini berarti bahwa masalah keterangan sejarah (*historical explanation*) tidaklah bisa dipisahkan dari kesadaran struktural tersebut. Dalam hal ini pula

barangkali antara "peristiwa sebagai-bagian-dari struktur dengan "peristiwa" sebagai proses, yang memperlihatkan dinamik dari kehidupan bisa pula diperlihatkan.

Pembentukan struktur dari totalitas aktivitas manusia dan pengaitan dari berbagai kegiatan itu hanyalah mungkin jika suatu masalah pokok telah dirumuskan. Kesemuanya hanyalah bisa seandainya pertanyaan utama telah diajukan. Pertanyaan itu masalah pokok inilah yang merupakan **blue print**, cetak biru, dari struktur tersebut. Hal ini pula yang menentukan **relevance** atau tidaknya suatu kesaksian, **significance** atau tidaknya suatu peristiwa. Maka dengan begini pembuatan struktur tersebut bersifat selektif. Dan, karena juga subyektif. Sebab, pertanyaan pokok itu bertolak dari suatu keprihatinan intelektual, yang mau tak mau bersifat subyektif.

Kesadaran struktural dan intelektual inilah yang antara lain merupakan sumbangan utama ilmu sejarah pada ilmu-ilmu sosial. Kaitan dari kesemuanya memperlihatkan kompleksitas dari berbagai macam interaksi. Hal ini bisa diperjelas karena, kembali Hobsbawm bisa dikutib, sejarah tidaklah berhadapan dengan masyarakat dalam pengeritan abstrak, tetapi dengan "masyarakat yang merupakan hasil dari kelampauannya".

Dan apakah yang lebih riil, selain dari pada masyarakat lokal, yang telah dibatasi dengan jelas ruang lingkupnya? Meskipun pengerjaannya bertolak dari suatu asumsi dasar bahwa lokalitas itu adalah bagian dari suatu unit yang lebih besar, tetapi tingkat keakraban dengan sasaran penelitian (**subject-matter**), seperti telah disampaikan di atas, lebih memungkinkan si sejarawan untuk membentuk struktur dari pengalaman historis dan mencari kaitan dari berbagai corak aktivitas. Pengenalan yang akrab terhadap kedua hal ini dan juga kaitan antara aktivitas manusia dengan kekuatan historis yang terjadi di luar kebebasan bertindak — antara kemerdekaan dan keharusan historis — seperti yang dengan jelas bisa dihasilkan sejarah lokal itu akan lebih pula memungkinkan diadakannya studi komparatif yang tidak terjerumus kepada pencampur-adukan retorika politik dengan kebenaran historis.

Sejarah pada dasarnya memang bersifat komparatif. Tiada gejala bisa dimengerti, bahkan tiada **significance** yang bisa dilekatkan kepada suatu peristiwa, tanpa adanya kesadaran komparatif. Tetapi dengan sejarah lokal, unit-unit analisa yang bisa dibanding-bandingkan itu lebih diperjelas. Dalam bentuk pemikiran ini sumbangan sejarah lokal terhadap sejarah nasional kelihatan

an jelas pula. Bukan saja **explanation** atau keterangan logika tentang kausalitas dari rentetan peristiwa akan dapat di-test dengan berbagai perbandingan, unit analisa yang diperbandingkan itu akan memberikan dua hal lain. Pertama, peristiwa-peristiwa itu dapat ikut menentukan **mainstream**, aliran pokok, dalam sejarah nasional. Dengan kata lain studi komparatif itu bisa diharapkan untuk mencari keseimbangan antara "kebenaran ideal" dengan "kebenaran empiris". Kedua, menentukan manakah peristiwa yang bisa dianggap sebagai ilustrasi dari struktur, yang berfungsi sebagai wadah dalam mana proses terjadi. Dan menentukan manakah peristiwa yang memperlihatkan dinamik sosial, yang merupakan unsur utama dari perubahan historis.

Jadi meskipun sejarah lokal dan sejarah nasional masing-masing merupakan studi yang otonom dan masing-masing mempunyai ukuran **significance** yang belum pula tentu sama, pengerjaan sejarah lokal akhirnya akan lebih memperkuat basis historitas dari sejarah nasional. Dengan begini sesungguhnya lingkaran pembicaraan kita kembali ke titik awal: pengerjaan studi sejarah hanyalah mungkin jika ia telah didahului oleh suatu pertanyaan pokok. Dan, sekali lagi, pertanyaan ini bersumber dari suatu keprihatinan intelektual. Atau lebih khusus lagi, dari suatu kesadaran sejarah. Maka dapatlah dibayangkan apa jadinya suatu studi akademis ditopang sepenuhnya oleh etik dan konvensi akademis, serta didorong suatu **intelektual concern** yang nasionalistis.

Adalah benar apa yang dikatakan oleh Cassirer bahwa di awal penelitiannya si sejarawan akan berhadapan dengan suatu "dunia simbol". Mengapa tidak, bahkan ia sendiri adalah bagian dari dunia itu. Dan memang usaha pertama adalah justru mencoba membaca simbol-simbol. Karena itulah pula Cassirer tanpa ragu-ragu berkata bahwa pada "semua kebenaran faktual, terkandung di dalamnya kebenaran teoritis".

Namun setelah proses pengerjaan sejarah itu selesai, maka makna sejarah-lah yang harus dicari sejarawan. Makna inilah — sesuatu yang tersembunyi di belakang rentetan peristiwa dan di balik kaitan interaksi manusia — yang pada gilirannya membentuk kesadaran sejarah. Inilah yang memberikan "**corwning achievement**", kalau Namier akan diulang.

Untaian dari **intelektual concern**, struktur kesejarahan, yang didukung oleh penelitian akademis, dan kesadaran sejarah, akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kom-

pleksitas dari perjalanan sejarah dan tentang interaksi manusia dengannya. Dengan disertai oleh keprihatinan intelektual yang bercorak nasional -- atau katakanlah Pancasila -- maka untaian tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa apa yang semestinya harus terjadi, tetapi **tidak** terjadi. Dan lebih penting lagi, kebijaksanaan tentang tuntutan di hari esok. Bukankah akhirnya sejarah-sebagai-yang diceritakan (*histoire-re'cite'*) adalah suatu perpaduan yang tersamar antara "pemikiran tentang hari depan, antisipasi terhadap hari esok, dan putusan di hari kini"?

\* \* \*

## B A B II

### SEJARAH LOKAL: TANTANGAN DAN HARAPAN

Oleh : Mukhlis

Penduduk Sulawesi Selatan adalah masyarakat majemuk. Kemajemukan itu bersifat multidimensional. Ada yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, organisasi politik, adat-istiadat, agama dan juga karena perbedaan masa lampau. Memahami kemajemukan ini sangat penting artinya bagi usaha-usaha integrasi nasional. Alasan di atas mungkin dapat dijadikan dasar untuk mengatakan betapa pentingnya mempelajari sejarah lokal, sebagai salah satu usaha untuk memahami keanekaragaman masyarakat kita.

Akan tetapi, menggali dan mempelajari sejarah lokal khususnya sejarah lokal Sulawesi Selatan, bukan pekerjaan yang mudah, apalagi untuk mengerjakannya di perguruan tinggi. Beberapa kesulitan sekitar itu antara lain masalah :

- a. Sumber-sumber sejarah lokal
- b. Ethnis-kultural dan regio centris
- c. Amaturis dalam penulisan sejarah lokal
- d. Masa depan study sejarah lokal.

#### Sumber-sumber sejarah lokal

Ada dua jenis sumber sejarah, lisan dan tertulis, keduanya sulit diperoleh di daerah. Sumber-sumber lisan untuk periode lama sampai dengan awal abad ke-20, sudah sangat langka. Untuk sejarah Gowa misalnya, mungkin hanya Hamzah Daeng Tompo satu-satunya bekas pejabat tinggi kerajaan Gowa yang masih hidup dan dapat diminta keterangannya tentang birokrasi tradisional kerajaan Gowa. Jika masa lampau ini tidak secepatnya diabadikan, maka dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan kehilangan sesuatu yang tak ternilai harganya, jejak masa lampau. Ia akan hilang dan tak mungkin lagi kita miliki. "Kalau demikian mari kita lakukan dokumentasi melalui wawancara secepatnya", kata seorang mahasiswa jurusan sejarah. "Tunggu dulu", kata realitas sosial di sekitarnya. Mengabadikan sumber-sumber lisan melalui wawancara tidak semudah menyuruh burung perkutut untuk manggung.

Mengabadikan sumber-sumber lisan melalui wawancara sering kali menemui jalan buntu. Berbagai masalah muncul sebagai hambatan untuk melakukan wawancara, satu di antara-

nya ialah hambatan struktural yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Siapa pewawancara dan siapa yang diwawancarai.

Kesulitan lain dalam wawancara ialah soal bahasa. Seorang pewawancara, peneliti atau sejarawan yang dibesarkan dalam lingkungan etnis-kultural Bugis mendapat kesulitan untuk berkomunikasi dengan informan pemilik sumber lisan yang hanya mampu berbahasa Makassar, Maudar atau Toraja saja, demikian pula sebaliknya. Karena itu mudah di mengerti jika skripsi tentang Bugis ditulis oleh mahasiswa asal daerah Bugis; skripsi tentang Makassar oleh putera daerah Makassar, demikian pula tentang Mandar dan Toraja.

Penggunaan sumber-sumber tertulis tak kalah peliknya (khusus **lontara**). Berhadapan dengan naskah lama **lontara** tak ubahnya mencari jalan setapak di tengah belantara. Karena sekalipun mampu membaca abjad **lontara**, belum dapat dijamin untuk mengerti apa yang dibaca, belum lagi memahami maksud yang terkandung dibaliknya. Satu di antara kesulitan yang sering dijumpai dalam membaca abjad **lontara** seperti berikut :



**Makanja** nawa-nawanua Arung Palakka

**Makaja** nawa-nawauna Arung Palakka

**Makkaja** nawa-nawauna Arung Palakka

Artinya :

Baik angan-angan Arung Palakka

Burung angan-angan Arung Palakka

"Menjeleja" atau "menerawang" angan-angan Arung Palakka.

Kesulitan yang terkandung dalam **lontara** sebenarnya ada dua hal utama, (1) bagaimana mengartikan yang tersurat dan yang tersirat, (2) status **lontara** itu sendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya bagi pemilik **lontara**.

Bagi beberapa keluarga tertentu, atau pemilik **lontara**, wujud **lontara** dan isinya adalah sesuatu yang suci, **regalia** yang sangat dihormati. Dalam statusnya yang demikian, **lontara**

tabu untuk terjamah oleh tangan biasa. Ketertutupan **lontara** untuk digauli, merupakan salah satu sebab munculnya "amatiran" dalam penulisan sejarah di Sulawesi Selatan. Dapat dipastikan bahwa hampir semua penulis sejarah lokal di Sulawesi Selatan adalah pemilik **lontara**, keluarga terdekat pemilik **lontara** atau salah seorang dari kaum kerabatnya atau pejabat yang pernah berhubungan dengan Yayasan Matthes di Ujung Pandang. Umumnya yang disebut terakhir ini tidak mengembalikan lagi **lontara** atau buku koleksi Yayasan Matthes yang dipinjamnya, **eigendom**. **Lontara** yang dimilikinya merupakan sumber utama yang digunakan tanpa kritik ataupun perundingan dengan **lontara** lain. Kekeliruan yang sering terjadi dalam penulisan sejarah lokal yang dikerjakan oleh para amatiran ialah ketidak mampuannya membebaskan **lontara** dari sifat-sifat **fiction** dan **fictive**. Selain itu kesalahan besar yang umumnya diderita penulis amatiran, ialah kecerobohan menggunakan sumber tanpa melakukan seleksi atau kategorisasi atas sumber-sumber sebelum digunakan. Keduanya dapat disebut sebagai penyakit metodologis.

Ketidak mampuan untuk membedakan antara **lontara** yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan sejarah dengan **lontara** yang hanya berisi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak, menyebabkan banyak tulisan sejarah lokal berpredikat "new **lontara**". Pada umumnya kebanyakan orang mengetahui bahwa **lontara** adalah manuscript masyarakat Sulawesi Selatan yang banyak mengandung informasi sejarah, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa **lontara** terdiri atas 12 jenis. Antara satu **lontara** dengan **lontara** lainnya dapat dibedakan menurut isi yang terkandung di dalamnya, antara lain berikut ini: (1) **Lontara Paseng**, (2) **Lontara Atturiolong** atau **lontara matturiolong**, (3) **Lontara Pau-pau**, (4) **Lontara pau-pau rika-dong**, (5) **Lontara Pappangaja**, (6) **Lontara Ulu ada**, (7) **Lontara Sure Bicara Atturiolong**, (8) **Lontara Allopiloping**, (9) **Lontara Rapang rileng Mpanua**, (10) **Lontara Pau Kotika**, (11) **Lontara sure E'ja**, (12) **Lontara Sure bawang**.

### (1) **Lontara Paseng**

Kumpulan amanat, pesan-pesan berharga dari tokoh-tokoh masyarakat terdahulu yang diamanatkan secara turun-temurun. Paseng dapat juga berupa kumpulan perjanjian antara keluarga yang dipatuhi turun-temurun oleh pihak keluarga penerima paseng.

(2) **Lontara Aturio atau patturiolo (a) ng.**

Kumpulan catatan mengenai asal-usul atau silsilah raja-raja, silsilah keluarga-keluarga bangsawan tertentu atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami atau didengar dari orang lain oleh penulis **lontara** sendiri. Umumnya **lontara atturiolong** ditulis atas permintaan raja atau permintaan seorang bangsawan tertentu.

(3) **Lontara Pau-pau.**

Berisi cerita tentang tokoh atau orang-orang tertentu yang berperan masa lampau. Penulisan **pau-pau** sering kali ditambah dengan "bumbu" yang berlebih-lebihan.

(4) **Lontara Pau-pau rikadong.**

Berisi kumpulan legende berbagai peristiwa. Banyak di antara kisah yang dilukiskan dalam **pau-pau rikadong** adalah juga kisah yang terdapat dalam **lontara** lain, perbedaannya terletak pada cara menyuguhkan cerita. Namun jika kedua jenis **pau-pau** akan digunakan sebagai sumber, jenis **lontara pau-pau** lebih memungkinkan sekalipun untuk itu masih memerlukan kritik yang mendalam.

(5) **Lontara Pappangaja.**

Berisi kumpulan pedoman-pedoman hidup tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, di dalamnya berisi juga kumpulan pengajaran tentang budi pekerti.

(6) **Lontara Ulu ada atau lontara ulu kana.**

Berisi kumpulan perjanjian antar kerajaan atau kontrak-kontrak antar kerajaan, seperti misalnya, (a) Perjanjian antara tiga kerajaan Bugis, Bone, Wajo, dan Soppeng. (**Lamumpatue ri Timurung**, 1565), (b) Perjanjian antara kerajaan Bone dan Wajo (**Ceppae ri Conrana**, 1560), (c) Perjanjian Gowa-Kompeni (**Ulu Kana Cappaya ri Bangaya**, 1667).

(7) **Lontara Suru Bicara Atturiolong.**

Kumpulan peraturan, undang-undang yang berlaku dalam suatu kerajaan. Sumbernya diperoleh dari pesan negarawan terdahulu.

(8) **Lontara Allopi-loping atau Ade Allopi-leping.**

Berisi kumpulan undang-undang hukum pelayaran yang menyangkut semua aspek pelayaran, antara lain: Perjanjian upah nakhoda dan awak perahu, muatan perahu, warisan pelayaran, jalur pelayaran, jenis barang dan tarif, penyelesaian perkara dll.

(9) **Lontara Rapang ri laleng Mpanua.**

Peraturan dalam negeri yang dasar hukumnya bersumber dari penyelesaian kasus-kasus terdahulu yang diselesaikan secara mufakat. Pada umumnya masalah yang diselesaikan dengan menggunakan **lontara rapong** dasar hukumnya tidak terdapat dalam **lontara bicara atturiolong**.

(10) **Lontara Pau kotika.**

Menguraikan secara khusus masalah waktu. Waktu baik dan waktu buruk untuk sesuatu pekerjaan. **Pau ketika** berisi juga ramalan, simbol-simbol, nujum dan pengetahuan tentang cuaca dan musim.

(11) **Lontara Suro E'ja.**

Kumpulan syair atau prosa lirik yang juga disebut **elong** atau **kelong**, terbagi atas 4 jenis, yakni: (a) **elong-Osong** atau nyanyian perang, (b) **elong bissu**, mantra ritus, (c) **elong Padede**, syair yang didengarkan untuk menidurkan anak-anak. **Elong Padede** mengandung ajaran-ajaran moral, kepahlawanan, kesetiaan, keuletan dan semangat juang. Hampir tidak banyak orang lagi yang menghafal syair-syair **elong padede**, karena itulah maka **elong padede** sudah sangat jarang didengar. Namun demikian ini tidak berarti bahwa generasi muda yang lahir sekarang tidak memerlukan pesan-pesan yang terkandung dalam **elong padede**.

(12) **Lontara Sure Bawang.**

Kumpulan cerita roman, khususnya roman sejarah. Jenis **Lontara Sure Bawang** disajikan dengan bahasa yang indah dan mudah dimengerti, banyak di antaranya mengandung informasi yang dapat dipercaya, sekalipun tentu saja harus disaring sebaik-baiknya. **Sure bawang** umumnya ditulis oleh banyak orang sehingga untuk satu topik yang sama dapat ditemukan version yang berbeda-beda, menurut siapa penulisnya.

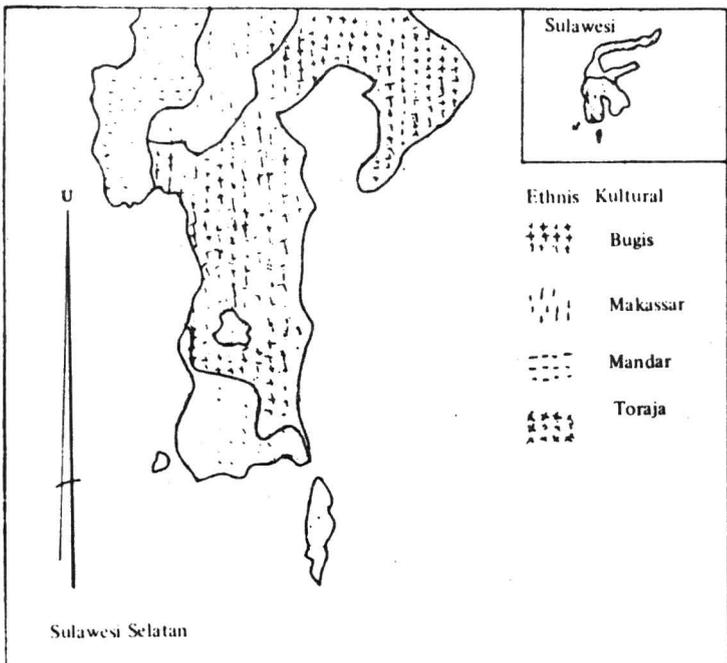
**Ethnis – kultural dan Regio centrisme.**

Ada empat suku bangsa yang mendiami Propinsi Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Orang Bugis berjumlah sekitar 4 juta jiwa, mendiami 14 Kabupaten yakni: Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng–Rappang, Piurang, Polewali, Mamasa, Eureka, Luwu, Pare-pare, Paruru, Pangkajene Kepulauan, dan Maros.

Orang Makassar berjumlah sekitar 2 juta jiwa, mendiami 5 kabupaten, yakni: Gowa, Takalar, Jenepono, Bantaeng dan Selayar.

Orang Mandar berjumlah sekitar setengah juta jiwa mendiami dua kabupaten di daerah pesisir pantai Barat Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju.

Orang Toraja berjumlah sekitar satu juta jiwa. Mendiami dataran tinggi di kawasan pegunungan Sulawesi Selatan bahagian tengah. Daerahnya meliputi Kabupaten Tanah Toraja.<sup>1</sup> Penyebaran suku bangsa dan kawasan etnis-kulturalnya dapat dilihat dalam peta berikut ini :<sup>2</sup>.



Di daerah etnis-kultural Bugis berdiri tujuh kerajaan utama yang juga sebagai pusat kekuasaan tradisional Bugis, yakni: Luwu, Bone, Soppeng, Suppo, Sawitto, Wajo dan Sidenreng. Ke tujuh daerah kerajaan Bugis tersebut terbagi atas tiga teritorial kekuasaan yang juga menjadi salah satu sumber utama lahirnya regio centrisme Bugis, yakni :

1.	a. Luwu	Regio centrisme Luwu.
2.	a. Bone b. Wajo c. Soppeng.	Regio centrisme Tellu Mpoccoe.
3.	a. Suppa b. Sawitto c. Sidenreng.	Regio centrisme Mellusetasi.

Di daerah etnis-kultural Makassar berdiri dua kerajaan utama, Gowa dan Tallo. Kedua kerajaan orang Makassar ini terbagi atas sembilan daerah inti, yakni :

1.	a. Paccellekang b. Tombolo c. Pattallassang d. Bontomansi Ilau e. Bontomani Iraya.	Regio centrisme Gowa.
2.	a. Samata b. Pannampu c. Moncong loe d. Parang Loe.	Regio centrisme Tallo.

Sebenarnya regio centrisme Gowa dan regio centrisme Tallo sudah mengendor sejak kedua daerah dipersatukan sekitar tahun 1525. Sejak itu Gowa dan Tallo terikat pada persekutuan kekuasaan yang disebut *rua karaeng se're ata*, artinya: dua raja seorang hamba.

Raja Gowa secara turun-temurun menjadi raja di kerajaan koalisi (Gowa-Tallo) sedang raja Tallo secara turun-temurun menjadi orang kedua di kerajaan koalisi. Jabatan ini disebut

**baligau** atau **tumabicara butta**. Dari segi pemerintahan, kawasan kedua kerajaan koalisi disebut saja kerajaan Gowa, tetapi dari segi etnis kultural penduduknya disebut **mangkasara** atau **orang Makassar**, daerahnya disebut **Pa' rasangganna mangkasaraka** (**kampung halaman orang Makassar**) atau **butta mangkasara** (**kampung halaman orang Makassar**) atau **butta mangkasara** (**tanah Makassar**).

Di daerah etnis kultural Mandar, berdiri 14 kerajaan kecil. Keempat kelas kerajaan kecil ini terikat pada dua persekutuan kekuasaan, keduanya menjadi simbol **utama regio centrisme Mandar**, daerah tersebut meliputi :

1.	a. Tabulahan b. Matangan c. Rantebulahan d. Bambang e. Arallo f. Mambi g. Tabang.	Regio centrisme pitu ulunna salu.
2.	a. Balanipa b. Tinambung c. Majene d. Bambapuang f. Tappalang g. Mamuju	Regio centrisme Bitu babbana binanga

Sekalipun kawasan etnis-kultural Toraja meliputi juga sebahagian besar daerah propinsi Sulawesi Tengah, namun yang dimaksudkan di sini hanya territorial yang didiami oleh group etnis Toraja Sa'dan yang mendiami kabupaten Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Daerahnya tinggi terbagi dalam sembilan bahagian, yakni : Rinding Allo, Saluputi, Sangalla, Mengkendek, Ponggakaradeng, Makale, Sesaan, Rantepao dan Sanggalangi<sup>3</sup>.

Dibanding dengan ketiga etnis-kultural lainnya, Toraja memiliki beberapa kekhususan, antara lain masih kuatnya berbagai pranata tradisional di masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja juga percaya bahwa bangsawan dan penguasa di ketiga daerah kerajaan, Bugis, Makassar dan Mandar berasal dari pecahan darah bangsawan Toraja. Pengakuan orang Toraja atas kemurnian daerah mereka diperkuat oleh legende yang berkembang di ketiga daerah, Bugis, Makassar dan Mandar. Hal ini me-

nimbulkan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Toraja, terutama di kalangan bangsawan. Keadaan ini turut memperkuat bentuk **regio centrisme Toraja**, sekalipun dalam kenyataannya sepanjang sejarah Toraja, kawasan ini menjadi rebutan silih berganti dari kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar.

### **Amaturis dalam penulisan Sejarah Lokal.**

Diakui bahwa penulisan sejarah lokal hingga saat ini, umumnya dikerjakan secara amaturis oleh putera-putera daerah sendiri<sup>4</sup>. Tuntutan metodologis dari ilmu sejarah yang tak pernah dipenuhi, menyebabkan timbulnya subyektifitas yang berlebih-lebihan. "Pembajakan" berbagai peristiwa dari konteks daerah etnis-kultural yang berskala besar banyak dilakukan oleh para "amatiran". Masa lampau yang gemilang dan kisah kepahlawanan orang-orang Bugis "diadopsi" ke lingkup keluarga yang berskala kecil, ke dalam sejarah Bone, sejarah Wajo, sejarah Soppeng, sejarah Suppa, sejarah Sawitto, sejarah Sidonreng, sejarah Luwu. Demikian juga yang terjadi dalam penulisan sejarah Gowa, sejarah Tallo, sejarah Balanipa, sejarah Sangalla dan lain-lain. Berapa besar biaya "adopsi", tergantung dari pesanan.

Pemujaan pada tokoh dan simbol-simbol daerah yang berlebih-lebihan menimbulkan semangat kedaerahan atau regionalisme yang sangat kuat. Sebenarnya secara praktis hal ini berguna, karena di sinilah jiwa patriotisme secara mendasar diperkenalkan pada generasi muda. Namun demikian apakah untuk itu citra ilmu sejarah harus tergadai.

Penulisan sejarah lokal sebenarnya perlu dijinakkan. Perguruan tinggi sebagai suatu lembaga ilmiah memegang peranan penting di sini. Untuk tujuan itu, tradisi pengajaran sejarah, khususnya sejarah lokal perlu direnungkan. Seorang mahasiswa yang memperoleh kuliah **Sejarah Regional Sulawesi Selatan**, pasti mengetahui perjanjian Bungaya, misalnya. Namun demikian apa yang diketahuinya tentang perjanjian Bungaya, tak lebih dari apa yang diketahuinya dari guru sejarah kita ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar, atau yang dibacanya dari berbagai karya amaturis. Apa yang diketahui tentang perjanjian Bungaya tak lebih dari sederetan pasal-pasal di atas kertas, tanpa sesuatu akibat yang berarti.

Di perguruan tinggi, peristiwa demi peristiwa seharusnya diberi bobot, di samping pengamatan mahasiswa dialihkan dari pengetahuan yang umum ke yang khusus sifatnya, misalnya: Bagaimana struktur Birokrasi tradisional Gowa dan bagaimana

setelah setelah sistem administrasi kolonial mulai dipraktekkan. Bagaimana dengan mobilitas sosial dalam tatanan masyarakat baru sesudah Bungaya. Bagaimana dengan pembauran suku-suku bangsa dalam wilayah administrasi kolonial. Bagaimana dengan gerakan-gerakan sosial yang tumbuh setelah perjanjian Bungaya. Bagaimana dengan pembagian tanah dan pembagian kekuasaan, dan banyak lagi.

Mengalihkan pengamatan mahasiswa dari yang umum ke yang khusus sangat penting artinya, karena dengan demikian paling kurang generasi muda Bugis dan Makassar berangsur-angsur dibebaskan dari suatu perdebatan klasik antara kedua suku di Sulawesi Selatan. Perdebatan yang tak ada habisnya antara kemenangan Arung Patacka dan KEKALAHAN Sultan Hasanuddin, perdebatan antara pengkhianatan dan kepahlawanan antara kedua tokoh.

Mengalihkan perhatian ke hal-hal yang khusus, sebenarnya bukan pekerjaan yang terlalu sulit. Cuma, bagaimana mengukur dalamnya pengetahuan umum mahasiswa tentang peristiwa sejarah lokal.

Di muara sungai Jeneberang ada sebuah desa yang dihuni oleh beberapa keluarga nelayan yang miskin, Maccini Sombala namanya. Setiap hari libur tempat itu ramai dikunjungi orang. Berenang, mendayung, memancing atau pacaran sambil menikmati keindahan alam. Sangat disayangkan karena hampir tak banyak orang lagi yang tahu kalau di tempat itu 4 abad yang lalu berdiri kota Samba Opu, pusat kekuasaan kerajaan Gowa. Di tempat itu juga pernah berlangsung suatu pertemuan bersejarah bagi Indonesia Timur, yakni pertemuan antara Sultan Babullah dari Ternate dan Karaeng Tunijallo dari Gowa<sup>5</sup>. Pertemuan ini sangat besar artinya jika masalah Islamisasi di Indonesia Timur akan dibicarakan. Tidak banyak orang yang mengetahui lagi kalau di tempat itu juga ratusan orang gugur dalam perang kolonial ketika mereka mempertahankan ibu kota kerajaan (1665-1667). Hampir tak ada orang lagi yang tahu kalau di tempat itulah Nakhoda Bonang berlabuh (sekitar 1525), siapa Nakhoda Bonang tak banyak orang lagi yang tahu. Namun jika hubungan Makassar-Bugis dan Tanah Melayu dibicarakan, peristiwa ini besar artinya<sup>6</sup>.

Di sinilah letak kesulitan beranjak dari masalah yang bersifat umum ke yang khusus, karena suatu kejadian atau peristiwa tidak berdiri sendiri, melainkan bertautan dengan sejumlah peristiwa lainnya. Satu peristiwa adalah juga sebuah instru-

ment yang memiliki intone tersendiri, namun secara keseluruhan, ia hanya satu di antara sekian banyak instrument yang bersama-sama melagukan irama jamannya dalam sebuah pagelaran simponi sejarah.

"Apa yang timbul, dan apa yang tenggelam.  
Tidak tercerai-berai, melainkan berkesinambungan,  
Hari kemarin memangku hari sekarang.  
Dan hari sekarang menumbuhkan hari depan"<sup>7</sup>

Betapa rumitnya pengajaran sejarah lokal di perguruan tinggi, karena perbendaharaan mahasiswa akan peristiwa-peristiwa lokal sangat miskin. Akibatnya, volume pengajaran sejarah lokal bertambah. Sasarannya tidak hanya dimaksudkan untuk menjinakkan fanatisme kedaerahan, dan usaha penulisan dan penelitian sejarah lokal yang berbobot ilmiah, tetapi juga masih harus menambah perbendaharaan mahasiswa akan relatif historama lokal.

Ketiga maksud di atas hanya "mungkin dapat terwujud jika para sarjana sejarah mau berbakti di perguruan tinggi daerah" welcome.

#### **Masa depan study sejarah lokal.**

Minat mahasiswa terhadap sejarah lokal cukup besar, tetapi jika kepadanya diminta untuk menekuni sumber-sumber sejarah lokal, terutama lontara untuk sejarah lokal berperiode lama, terdengar keluhan :

##### **Jama-jamang buku**

Artinya :

Pekerjaan yang membuat tulang belakang menjadi bungkuk.

##### **Jama-jamang paccappu umuru**

Artinya :

Pekerjaan yang menghabiskan usia.

Karena itu mudah dimengerti kalau kebanyakan mahasiswa "takut" menulis skripsi yang berperiode lama, kapan (yang dimaksud di sini abad ke 18 dan 19),selesainya kata mereka. Memilih topik berperiode "tanggung" masalahnya lain lagi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lontara hanya berlangsung sampai dengan abad ke 17<sup>8</sup>, sementara sumber-sumber penggantinya sulit diperoleh di daerah. Arsip kolonial diakui

sangat berperan sepanjang periode ini. Informasi yang terdapat di dalamnya mudah dimengerti dan tidak memerlukan banyak "energy" jika akan digunakan sebagai sumber, karena di samping subyektivitasnya yang berkadar rendah, kredibilitasnya dapat diandalkan<sup>9</sup>. Namun demikian arsip kolonial ternyata hanya mampu menyajikan sebahagian besar segi fisik, karena memang aspek ini lebih berhubungan dengan kepentingan kolonial. Jika demikian, arsip kolonial hanya mampu menggantikan beberapa fungsi dari lontara dan sumber-sumber lokal lainnya, karena pikiran, ide, perasaan, harapan dan hubungan sosial di kalangan rakyat banyak tidak terekam dan terjangkau<sup>10</sup>.

Menghadapi kenyataan di atas, mahasiswa lebih cenderung memilih topik penulisan dan penelitian yang berperiode baru, terutama sekitar proklamasi, sekalipun tidak berarti topik ini lebih mudah atau lebih enteng, alasannya cukup praktis, sumber mudah dijangkau. Jika demikian apakah sejarah lokal berperiode lama ditinggalkan saja; tentu tidak! Tetapi bagaimana mencari sesuatu yang baru untuk mempelajari yang lama<sup>11</sup>.

## FOOTNOTES

<sup>1</sup> Lihat Matullada, Kebudayaan Bugis Makassar, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Koentjaraningrat (ed), 1975. Hal. 261.

<sup>2</sup> Ibid, Lihat juga: Laporan Bagian Statistik dan Sensus Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (1979).

<sup>3</sup> Lihat, Kottey Nooy Palm, *The Sa'dan Toraja. A Study of Their Social Life and Religion* (The Hague Martinus Hijhoff), 1979.

<sup>4</sup> Lihat pada, Taufik Abdullah (Ed), *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press) 1979, Hl. 1-28.

<sup>5</sup> Babullah berkunjung ke Makassar tahun 1580. Lihat F. Valentijn, "Oud en Nieuw Oost-Indie, 1724, 1 2 Hal. 208. Lihat juga : F.S.A., de Clerq, "Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate", Leiden 1890, Hal. 154.

<sup>6</sup> Lihat, A.A. Cence, *Beberapa Tjataan Mengenai Penulisan Sejarah Makassar-Bugis*, (Bhratara, Jakarta) 1972. Hal. 17-18.

<sup>7</sup> Ruslan Abdulgani, "Kesadaran Sejarah dan Hari Depan Indonesia", *Arsip dan Sejarah*. (Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta) 1980., Hal. 2. Dikutip dari, pidato perpisahan Willem Bilderdijk (1756-1831) di Amsterdam.

<sup>8</sup> A.A. Cenoe, op. cit. hal. 20.

<sup>9</sup> Soeri Soeroto, "Penelitian Bahan-bahan Arsip: Masalah dan Kenyataan", *Arsip dan Sejarah* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia) 80., Hal. 63-79.

<sup>10</sup> Ibid, Hal. 68.

<sup>11</sup> Salah satu contoh dapat ditunjukkan di sini adalah usaha Dr. C.C. Macknight di Dep. of History, Australian National University, Canberra. Atas usahanya Dep. of History, ANU. memiliki koleksi lengkap lontara-lontara dalam bentuk video cassette dan micro film. Diharapkan dengan bentuk yang demikian dapat menimbulkan kegairahan untuk mempelajarinya.

## B A B III

### SEJARAH LOKAL DALAM KURIKULUM UNIVERSITAS

*Sebuah Catatan Ringkas*

Oleh: T. Ibrahim Alfian.

Tanah air kita, yang terdiri dari 13.677 pulau dan luas tanahnya 1.176.000 km<sup>2</sup>, dengan lebih kurang 300 suku bangsa yang memakai kira-kira 365 bahasa dan dialek dan berpenduduk lebih dari 140 juta dengan aneka ragam kebudayaan daerah, merupakan gugusan pulau-pulau yang terbesar di seluruh dunia. Menghadapi kenyataan seperti ini, yakni kebhinekaan bangsa, maka dalam upaya pengembangan bangsa yang diwujudkan secara nyata melalui usaha-usaha pembangunan untuk mencapai cita-cita bangsa, kita dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain usaha yang terus-menerus menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam upaya pembangunan bangsa kita mutlak memerlukan kesatuan dan persatuan bangsa, namun demikian, kita tidak boleh sekali-kali mengabaikan kebhinnekaan bangsa.

Salah satu cara untuk memperoleh informasi mengenai keanekaragaman bangsa, adalah melalui Sejarah Lokal yang terbagi atas dua kategori, yaitu Sejarah Lokal Khusus, berupa dinamika intern yang terjadi di masing-masing Daerah, dan Sejarah Peringatan Lokal (*Local Level History*), yakni bagaimana sesuatu aspek yang bersifat nasional terwujud di Daerah atau interaksi antara Pusat dengan Daerah.

Melalui Sejarah Lokal, yakni studi aspek apa saja dalam kehidupan manusia pada peringkat di bawah peringkat nasional (propinsi, kabupaten/kotamadya, dan desa), yang menimbulkan perubahan melalui dimensi waktu, kita akan dapat mengetahui keadaan mikro bangsa kita dengan segala detil keaneka-ragamannya.

Keadaan yang terjadi di suatu daerah dengan segala seluk-beluknya perlu diamati secara khusus supaya kita tidak kehilangan perspektif dalam pengambilan kebijaksanaan di segala bidang, baik di Pusat maupun di Daerah, demi persatuan bangsa dan pembangunan nasional.

Andaikata terjadi suatu peristiwa di suatu daerah yang hampir mirip dengan yang pernah terjadi di daerah lainnya, para pejabat pusat dapat menarik pelajaran, sehingga ketegangan

sosial dan pertentangan yang mungkin terjadi akibat peristiwa itu dapat dihindari.

Hasil penelitian Sejarah Lokal dapat memperluas cakrawala kita mengenai kebhinnekaan dalam kita menempuh jalan menuju ke keikaan, sehingga kita akan lebih mudah saling menghargai, memupuk toleransi serta memperkuat kerukunan antar suku bangsa, karena kita sadar bahwa kita merupakan bahagian dari kesatuan yang lebih luas.

Melalui hasil penelitian Sejarah Lokal dapat diperoleh informasi yang berharga bagi para pengguna seperti pejabat-pejabat pemerintah, pengusaha swasta, golongan politisi dll., jikalau permasalahan dapat dirumuskan atau pertanyaan dapat diajukan dengan tepat terhadap fenomena Sejarah Lokal, sebelum langkah penelitian selanjutnya dapat diambil.

Di atas telah dikemukakan sepintas kilas bahwa hasil penelitian Sejarah Lokal dapat menunjang pembangunan nasional, maka oleh karena itu sudah sewajarnya jika Sejarah Lokal dimasukkan ke dalam kurikulum Jurusan Sejarah di Universitas. Dengan demikian dapat pula dicapai perluasan dan pendalaman historiografi nasional khususnya, pengembangan ilmu sejarah umumnya, serta dapat pula dipergunakan sebagai arena pendidikan calon peneliti untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dengan menghemat waktu dan biaya.

Perlu dicatat di sini, bahwa yang dimaksud dengan Sejarah Lokal di Universitas, adalah sejarah lokal yang terjadi dalam propinsi tempat perguruan Tinggi itu berada. Sudah barang tentu jika dipilih topik-topik tertentu seperti aspek-aspek ekonomi, kebudayaan, politik, dll., ada hubungannya dengan hal-hal yang terjadi dalam wilayah-wilayah di luar propinsi itu atau juga dengan wilayah lain yang letaknya jauh dari propinsi tadi.

Dewasa ini kita baru mempunyai sembilan Jurusan Sejarah, yaitu Universitas-universitas Andalas, Diponegoro, Hasanuddin, Gajah Mada Indonesia, Jember, Pajajaran, Sebelas Maret, dan Sumatera Utara.

Ada sejumlah faktor, baik ekstern maupun intern, yang diperlukan untuk dapat menunjang berhasilnya pengajaran Sejarah Lokal di Universitas.

#### A. Faktor Intern :

1. Diperlukan tenaga pengajar yang dapat memberikan

Sejarah Lokal di Propinsi, tempat sebuah Jurusan Sejarah berada. Pengetahuan akan faktor sejarah Daerah merupakan prasyarat

2. Pengadaan tenaga pengajar yang dapat memberikan Teori dan Metodologi Sejarah Lokal serta sekaligus dapat memberikan bimbingan dalam penelitian Sejarah Lokal merupakan suatu keharusan.
3. Tersedianya suatu bibliografi mengenai Propinsi yang bersangkutan, seperti yang disusun oleh Muchtar Naim mengenai Sumatera Barat, mutlak diperlukan.
4. Terciptanya suasana dan mekanisme kerja yang memungkinkan lahirnya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak di luar Jurusan Sejarah.

#### **B. Faktor Ekstern.**

1. Kita tidak mungkin mengayunkan langkah dalam penulisan Sejarah, tanpa sumber-sumber, oleh karena itu untuk memperoleh sumber-sumber bagi penelitian Sejarah Lokal diperlukan kerjasama yang baik dengan Arsip Nasional R.I.
2. Sumber-sumber Sejarah Lokal kontemporer banyak terdapat di Kantor Gubernur, Bupati, Camat dan berbagai kantor-kantor wilayah, dinas-dinas dll., pada ABRI beserta jajarannya, dan di D.P.R., oleh karena itu supaya dicari jalan agar sumber-sumber ini dapat terjangkau, bilamana dikehendaki. Berbagai badan lain, pihak swasta, golongan karya, partai-partai politik, dll., sangat berguna untuk dihubungi guna memperoleh sumber-sumber yang diperlukan.
3. Uluran tangan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Dep. P. dan K., sangat diharapkan untuk dapat tersusunnya sebuah bibliografi tentang Propinsi yang bersangkutan dan dapat terbentuknya sebuah bank data untuk menyimpan berbagai sumber antara lain hasil-hasil wawancara. Di sini dapat disiapkan kegiatan masyarakat Sejarawan Indonesia (M.S.I.) untuk dapat menumbuhkan minat terhadap Sejarah di berbagai kalangan sehingga kendala yang mungkin timbul dapat diatasi dengan baik.

Sebagai penutup catatan ringkas ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa hasil penelitian Sejarah Lokal sangat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita dan dapat dipergunakan untuk mengobahsuaikan dan memantapkan berbagai kebijaksanaan dalam pengembangan bangsa dan negara, maka kegiatan Seminar Sejarah Lokal seperti yang mula dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional tahun 1982 ini patut dielu-elukan dan hendaknya dapat diteruskan untuk diadakan setiap tahun.
2. Kita belum memiliki teori dan metodologi Sejarah Lokal dengan mantap, oleh karena itu sudah sangat mendesak untuk diadakan sebuah lokakarya mengenai Teori dan Metodologi Sejarah Lokal sedapat mungkin pada tahun 1983.
3. Sebuah pertemuan patut diusahakan segera untuk membahas secara luas dan dalam masalah pemasukan Sejarah Lokal dalam kurikulum Jurusan Sejarah di Universitas yang faedahnya tidak hanya untuk mendidik calon peneliti dan untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilannya, tetapi juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang menunjang pembangunan nasional.

\* \* \*

## B A B IV.

### KOTA SEBAGAI BIDANG KAJIAN SEJARAH

Oleh : Kuntowijoyo.

#### I

Sejarah kota belum banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan akademis. Juga skripsi-skripsi di perguruan tinggi yang mengajarkan sejarah tidak menunjukkan adanya perhatian terhadap kota sebagai bidang kajian sejarah yang tersendiri. Barangkali hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan terhadap kekayaan dan kemungkinannya, padahal sejak abad ke-20 kota-kota di Indonesia sudah mengambil-alih banyak kegiatan dari pedesaan. Pergeseran dari desa ke kota terjadi bersamaan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, misalnya, pusat perlawanan tidak lagi di desa dengan pemimpin pedesaan sebagai penggerak, tetapi di kota dengan kaum terpelajar dan kelas menengah. Pergerakan sosial yang berkembang di kota-kota mempunyai ciri-ciri yang berbeda pula dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya. Sementara itu juga terjadi pergeseran dalam budaya ketika budaya kota menggantikan budaya desa, setelah kota-kota banyak terpengaruh oleh masuknya unsur-unsur budaya modern. Kelas menengah kota merupakan kelompok sosial tersendiri, keluar dari kerangka masyarakat tradisional dan budaya pedesaan. Dapat dikatakan, bahwa pada awal abad ke-20 kota muncul sebagai suatu kategori dalam sejarah Indonesia. Kota dapat disebut sebagai sebuah kesatuan yang secara sah berdiri sendiri, dan patut menjadi bidang kajian yang tersendiri pula.

Dengan tumbuhnya kota-kota tidak berarti hilangnya **ruralurban continuum** atau **folk-urban continuum**, dan sekaligus terjadi **rural urban contrasts** secara menyeluruh.<sup>1</sup> Dalam sejarah Indonesia proses urbanisasi tidak terjadi secara mendadak dan menyeluruh. Banyak ciri-ciri pedesaan masih terdapat dalam masyarakat kota, bahkan batas geografis antara kota dan desa kadang-kadang sukar ditegaskan. Hanya dalam ketentuan administratif, batas antara kota dan desa menjadi jelas. Pada abad ke-19 wilayah yang dianggap kota negara biasanya di bawah pengawasan langsung oleh pejabat tinggi administratif, seperti misalnya **patih**.<sup>2</sup> Dalam kajian mengenai kota, batas administratif inilah yang sering dijadikan dasar strategi penelitian, ter-

utama jika menyangkut masalah kependudukan.<sup>3</sup> Untuk penelitian sejarah, batas wilayah kota tentu saja mengikuti perkembangan kota itu sendiri, tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan administratif. Sering terjadi pemukiman-pemukiman penduduk yang secara sosiologis bisa disebut urban, tetapi terletak jauh dari kota induk sehingga menjadi kota satelit. Mereka yang tinggal di kota-kota satelit itu kebanyakan secara ekonomis, sosial dan kultural termasuk dalam lingkungan kota induknya, tetapi secara administratif masuk daerah lain.

Inilah yang terjadi dengan banyak pembangunan pemukiman baru oleh orang-orang Eropa dan Cina pada abad ke-19 dan oleh Perumnas akhir-akhir ini. Gejala terjadinya kota satelit ada sejak awal abad ke-20, yaitu jika terjadi pengelompokan kelas menengah dalam locus tertentu di luar batas administratif kota. Kota Gede yang berada di luar kota Yogyakarta misalnya mulai tumbuh sebagai kota-satelit tempat golongan kelas menengah.<sup>4</sup> Baik kota induk maupun kota satelit secara gradual memisahkan diri dari lingkungan pedesaan sekitar, dan menjadi lingkungan ekologi baru.

Pemisahan secara ekologis antara desa dengan kota tidak terjadi dalam pola pemukiman kota preindustrial. Tata kota tidak lahir karena maksimisasi teknologi atau ekonomi, tetapi karena suatu pola sosiokultural. Memang benar bahwa pemilihan pemukiman kota dapat berdasarkan alasan-alasan ekonomis, seperti misalnya kesuburan tanah sekitar, kemudian irigasi, tetapi pembentukan kota selalu dengan pertimbangan-pertimbangan sosiokultural. Memang benar bahwa pemilihan kota dapat berdasarkan alasan-alasan ekonomis, seperti misalnya kesuburan tanah sekitar, kemudian irigasi, tetapi pembentukan kota selalu dengan pertimbangan-pertimbangan sosiokultural. Sebagai pusat dari kota tradisional ialah kraton. Di sekitar kraton dapat dibangun rumah-rumah para sentana dan abdi dalem, tempat ibadah, dan pasar. Kadang-kadang kraton juga merupakan benteng dengan tembok yang melingkar, lengkap dengan lapangan dan tempat ibadah. Bahkan kota-kota administratif di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Surakarta menunjukkan pola yang sama di masa lampau. Nama-nama kampung dalam kota sering disesuaikan dengan abdi dalem yang tinggal di kampung itu.<sup>5</sup>

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk kota-kota perdagangan di tepi laut. Palembang, misalnya, meskipun merupakan kota administratif yang mengatur perdagangan antara penduduk sekitar dengan dunia luar, tidak mengikuti pola tata kota sosiokultural. Peta kota Palembang pada abad ke-19 tidak terbagi

karena pemusatan magis-religius dengan kraton sebagai pusat. Jalan-jalan dan fasilitas dalam kota tidak semata-mata ditujukan ke pusat, tetapi tersebar secara natural. Barangkali bahkan kedudukan kraton mengikuti perdagangan, dan bukan sebaliknya, karena kota-kota itu sudah ada sebelum pusat-pusat administratif didirikan. Ditambahkannya pemukiman orang-orang asing di kota preindustrial menegaskan sifat kekotaan kota-kota preindustrial. Di pusat-pusat perdagangan seperti Banten, orang-orang asing mendapatkan tempat tersendiri. Juga di kota-kota Indonesia Timur banyak perkampungan orang Jawa menjadi bagian dari peta kota sampai sekarang. Di Jakarta, perkampungan ethnias dalam kota masih dapat dilihat dari nama-nama bagian kota seperti Manggarai, yang sejarahnya dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan Belanda sejak VOC. Berbeda dengan kota-kota pedalaman kota-kota pantai lebih cepat menunjukkan sifat kotanya. Perkembangan Jakarta atau Medan sebagai kota metropolitan yang menampilkan budaya plural sudah dapat dilihat jauh sebelum kota-kota pedalaman mengalami proses pengotaan. Jika di kota pedalaman, adanya perkampungan Arab atau Cina masih merupakan enclave dalam lingkungan kota tradisional, di kota-kota pantai pemukiman orang asing menjadi bagian integral dari kota itu sendiri. Oleh karena itu sejarah kota di Indonesia tidak dimulai pada waktu yang sama. Ancar-ancar bahwa kota muncul sebagai sebuah kategori dalam sejarah Indonesia pada awal abad ke-20 semata-mata didasarkan pada sudut-pandang sosio-kultural lebih daripada ekologis.

Penegasan munculnya kota ditandai pula dengan munculnya kelas-kelas baru yang sama sekali lepas dari pertanian, orang kota yang sebenarnya. Pada awal abad ke-20 kelas baru muncul dari sektor industri dengan ciri-ciri yang berbeda dengan kelas-kelas sosial lain yang ada karena ketergantungannya yang tak terelakkan dari modal para investor, terutama investor asing. Meninggalkan pertanian berarti lepas dari kerangka masyarakat tradisional, ikatan desa, dan budaya pedesaan. Sementara itu dari sektor pendidikan muncul kelas baru golongan berpendidikan, yang meskipun sebagian masuk dalam birokrasi dan karena itu menjadi priyayi, tetapi mereka menunjukkan semangat baru sebagai sebuah kelas yang mencari tempat dalam masyarakat. Pertemuan antara golongan kelas menengah lama pribumi, golongan terpelajar, dan golongan pekerja di kota-kota menjadi tumpuan bagi timbulnya gerakan nasional. Dapat dikatakan bahwa pergerakan nasional adalah hasil budaya kota itu, yaitu ketika kelas-kelas baru memerlukan ideologi baru yang membe-

narkan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat tradisional dan kolonial.

Pada awal abad ke-20 sebuah kota Indonesia yang ideal akan mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sekaligus menunjukkan sejarah kota itu. Pertama, sektor kota tradisional yang ditandai dengan pembagian spasial yang jelas berdasarkan status sosial dan dekatnya kedudukan pemukim dengan kraton. Kedua, sektor pedagang asing, terutama pedagang Cina, yang mewarnai kehidupan kota dengan gaya bangunan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial-budaya tersendiri. Ketiga, sektor kolonial dengan benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung societiteit, rumah ibadah vrijmetselarij. Keempat, sektor kelas menengah pribumi yang kadang-kadang mengelompok dalam kampung-kampung tertentu, seperti Kauman di kota Yogyakarta dan Surakarta, atau di bagian lain. Kelima, sektor immigrant yang menampung pendatang-pendatang baru di kota dan berasal dari pedesaan di sekitar. Di sela-sela tempat-tempat ini terdapat gedung-gedung sekolah, pasar, stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya. Kita dapat membayangkan bagaimana pertemuan sosial-budaya dari bermacam sektor kota itu.

## II

Permasalahan yang menjadi bidang kajian sejarah kota sesungguhnya sangat luas sekali, seluas sejarah sosial sendiri, sehingga kadang orang menjadi heran apa saja yang tidak termasuk sejarah kota. Keluasan itu mendorong penulisan sejarah kota untuk memikirkan definisi bidangnya. Dari satu segi, sejarah kota dapat dimasukkan ke dalam sejarah lainnya, seperti sejarah ekonomi, politik, demografi, dan sebagainya. Di semua jenis penulisan itu kota hanyalah merupakan lokasi bagi kajian yang bermacam-macam. Jika semua yang mengenal kota, orang kota, kejadian di kota, dapat menjadi bidang sejarah kota, kiranya semua hal termasuk di dalamnya. Untuk menghindari kekacauan itu, dan untuk menghindari diri dari tumpang-tindih dengan bidang sejarah lainnya, orang mencoba membatasi bidang garapan sejarah kota. Dalam perkembangan penulisan sejarah di Amerika, Eric Lampard mencoba mendefinisikan sejarah kota dengan sejarah dari "urbanisasi sebagai proses kemasyarakatan", bukan sejarah dari "kota". Hasil dari sejarah kota yang demikian itu kemudian diberi nama "the new urban history"<sup>6</sup> Maksud dari pembatasan ini ialah untuk mengembalikannya bidang sejarah kota kepada gejala kekotaan yang khas,

yang menekankan kekotaan sebagai pusat perhatian sejarah. Pembatasan-pembatasan tentu saja tidak dimaksudkan untuk mempersempit bidang kajian, tetapi sekedar untuk membuatnya jelas dan mengukuhkan keabsahan sejarah kota sebagai suatu jenis penulisan sejarah. Oleh karena sejarah kota di Indonesia masih merupakan bidang yang belum digarap, biarlah sejarah kota dibuat seluas-luasnya, dengan catatan bahwa kekhasan kota hendaklah menjadi permasalahan yang pokok.

Pertama, bidang garapan sejarah kota ialah perkembangan ekologi kota. Ekologi ialah interaksi antara manusia dan alam sekitarnya, dan perubahan ekologi terjadi bila salah satu dari komponen itu mengalami perubahan. Penggunaan tanah kota untuk berbagai keperluan telah mengubah keadaan alamiah lahan ke dalam bermacam sektor. Ada tanah yang disediakan untuk pemukiman penduduk, itu perdagangan dan industri, untuk keperluan rekreasi, untuk perkantoran, dan sebagainya. Perubahan ekologi manusiawi terjadi sesuai dengan perkembangan penduduk, secara etnis, secara status, secara kelas, secara kultural, sehingga pola pemukiman mengalami pemisahan. Di beberapa kota di Indonesia, pemisahan secara etnis masih sangat nampak sebagai akibat dari politik pemukiman di masa lampau, atau sebagai perkembangan natural dari pemukiman kota sendiri. Pemukiman karena status sudah nampak dalam kota-kota tradisional, demikian juga pemolaan secara kultural konon nampak dalam pembagian dua pemukiman Hindu dan Buddha di jaman Madjapahit sekalipun yang terakhir ini kita tidak lagi melihat peninggalan yang lengkap. Dalam kota modern pola pembagian pemukiman kebanyakan berdasarkan kelas sosial. Kita melihat makin tergesernya penghuni kota yang lama oleh penghuni baru yang menempati bagian-bagian kota yang strategis: Bangunan fisik kota juga mengalami perubahan sesuai dengan pergeseran kelas itu. Terjadinya kampung-kampung dalam kota dengan ciri-cirinya yang penuh kesedihan disebabkan di antaranya oleh pergeseran pemukiman atas dasar kelas itu. Mengikuti perubahan pola pemukiman dengan sendirinya ialah kondisi lingkungan kota. Lingkungan elite kota akan menunjukkan diri sebagai simbol dari dominasi elite atas orang kebanyakan yang tinggal di tempat-tempat yang tidak menguntungkan. Perubahan ekologi juga terjadi karena kemajuan teknologi. Pembuatan jalan, jembatan, bangunan, saluran air, dan pembangunan perumahan semuanya mengubah lingkungan kota. Kemajuan dalam transportasi, seperti digantikannya kendaraan dengan tenaga manusia oleh kendaraan

dengan tenaga hewan, dan digantikannya kendaraan dengan tenaga hewan oleh kendaraan dengan tenaga mesin mempengaruhi kesibukan lalu lintas yang menjadi salah satu faktor dari ekologi kota. Demikian juga pendirian industri-industri adalah akibat langsung dari kemajuan teknologi itu. Ekologi juga berubah dengan adanya perubahan dalam organisasi masyarakat. Pertumbuhan sistem produksi industri kecil di rumah ke sistem produksi industri besar di pabrik adalah contoh yang jelas dari perubahan organisasi. Demikian juga pasar, warung, toko, department store, shopping centre adalah bentuk organisasi tukar-menukar ekonomi. Perubahan-perubahan dalam pola tukar-menukar itu nampak dalam bangunan fisik kota. Timbulnya birokrasi, perbankan, sekolah, semuanya mempengaruhi ekologi kota. Untuk menyebutkan satu contoh saja dalam kajian tentang perkembangan ekologi kota di Amerika ialah buku Sam Bass Warner, Jr., **Streets and Suburbs: The Process of Growth in Boston** yang meneliti mengenai pengaruh dari perkembangan teknologi transportasi kepada pemencaran permukiman.<sup>7</sup> Dengan kemajuan transportasi para pekerja tidak perlu lagi bermukim di dekat pabrik-pabrik mereka bekerja, sehingga kota dapat berkembang keluar.

Kedua, bidang garapan sejarah kota ialah transformasi sosial-ekonomis. Industrialisasi dan urbanisasi adalah bagian dari perubahan sosial. Sebagai lembaga masyarakat, dinamika sosial kota berbeda dengan kota preindustrial. Ungkapan, "Desa mawa cara, negara mawa tata", dalam bahasa Jawa dapat diartikan bahwa masyarakat kota preindustrial atau tradisional sebagai pusat kerajaan mempunyai aturan-aturan tersendiri berbeda dengan masyarakat desa. Perwujudan yang jelas dari konsep negara ialah kraton dan lingkungan kota-negara yang secara sosial, ekonomis, dan kultural memisahkan diri dengan desa. Sistem status yang ketat mewarnai pergaulan di kota tradisional, karena dekatnya masyarakat dengan raja menyebabkan pengaruh kesaktian raja terasa. Aturan-aturan yang keras dikenakan ketika orang berada di sekitar istana, dalam pakaian, sopan-santun, tutur-kata, yang semuanya menunjukkan status masing-masing dalam tata kerajaan. Dalam kota tradisional terdapat simbol-simbol dari kekuasaan raja, diwujudkan dalam bangunan fisik, upacara-upacara, dan hak-hak istimewa seperti **sengkleran**, **klangenan**, **pesanggrahan**. Kraton juga merupakan perwujudan dari birokrasi tradisional yang mengatur kekuasaan ekonomi dan sosial, tempat surplus produksi dibagikan kepada pembantu-pembantu raja. Berbeda dengan kota tradisional-pre

industrial, kota-kota modern-industrial menunjukkan ciri-ciri tersendiri. Tipe ideal dari kota industrial ialah pengelompokan keluarga ke dalam **nuclear family**, pembagian penduduk berdasarkan kelas sosial dengan mobilitas sosial yang kurang lebih lentur, ditinggalkannya cara memproduksi manual oleh mesin yang memproduksi barang-barang secara massa dengan pelayanan dan kualitas yang baik, organisasi produksi dipegang oleh unit-unit ekonomi yang cenderung besar dengan standardisasi dalam harga, timbangan, dan takaran, dan adanya birokrasi yang diangkat secara rasional. Barangkali kota-kota di Indonesia belum dapat dimasukkan ke dalam tipe ideal itu, apalagi kota yang relatif kecil. Namun adanya golongan pengusaha di kota yang menjadi penggerak bagi kemajuan sosial-ekonomi kota sejak awal abad ke-20 tidak diragukan lagi adanya. Clifford Geerts telah mempelajari sejarah sosial-ekonomi kota dalam dua bukunya, **Peddlers and Princes**<sup>8</sup> dan **The Social History of an Indonesian Town**<sup>9</sup>, yang dapat menjadi contoh bagi usaha-usaha penulisan tentang transformasi masyarakat kota.<sup>10</sup>

Ketiga, bidang garapan sejarah kota ialah sistem sosial. Kota sebagai sebuah sistem sosial menunjukkan kekayaan yang tak pernah habis sebagai bidang kajian. Kegiatan masyarakat kota, seperti kegiatan domestik, agama, rekreasi, ekonomis, politis, kultural, dan hubungan antar warga secara struktural antara lembaga-lembaga masyarakat, hubungan kategorikal antara kelompok-kelompok etnis, status dan kelas, dan bahkan hubungan personal antara sesama warga kota dapat dijadikan bahan kajian. Mungkin untuk meneliti tema ini bahan-bahan dokumenter tidak mencukupi, tetapi jika mengingat banyak tulisan-tulisan di surat-kabar, majalah, dan buku-buku sastra kiranya gambaran mengenai kota dapat menjadi lengkap. Juga kemungkinan mengadakan penggalian sumber melalui sejarah lisan akan sangat berguna. Setidak-tidaknya mengenai hubungan sosial di kota sejak awal abad ke-20 masih banyak sumber yang belum digarap, lebih lagi masih ada kemungkinan sumber lisan. Dari laporan-laporan pejabat-pejabat Belanda kita dapat tahu kehidupan kraton dan kota tradisonal, juga hubungan antara para bangsawan, bupati, dan pejabat dengan Belanda. Demikian pula dari novel-novel sastra Belanda-Indonesia nampak selain kehidupan para keluarga Belanda, juga hubungan mereka dengan para **priyayi** pribumi. Kota-kota karesidenan di jaman sebelum perang banyak menunjukkan aktivitas sosial dan kultural yang menandainya sebagai sebuah kota kolonial. Rekonstruksi kehidupan kota, dari kota sebesar Kupang sampai

kota sebesar Jakarta sebelum kemerdekaan akan mengingatkan banyak hal mengenai **tempo doeloe** yang banyak penggemarnya di kalangan generasi tua, karena nostalgia dan romantisisme. Di satu pihak, sejarah yang demikian akan mempunyai nilai estetik, dan di lain pihak nilai akademis. Barangkali sebagai contoh dapat disebutkan buku Kenneth A. Lockridge, *A New England Town : The First Hundred Years*,<sup>11</sup> yang mengungkapkan perkembangan kota sebagai sebuah lembaga demokrasi di Amerika Serikat. Buku ini mempunyai banyak keuntungan, karena sumber-sumber penulisan cukup banyak, bahkan sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Sebuah kota kecil di Massachusetts, Dedham, diteliti sejarahnya dari 1636 sampai 1736, dan ditunjukkan bagaimana kota itu berevolusi dari sebuah kota utopia dari kaum Puritan menjadi sebuah kota provinsi, termasuk di dalamnya perkembangan birokrasi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat. Sungguhpun untuk Indonesia penulisan semacam ini tidak mudah, tetapi masih bisa dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian yang tepat.

Keempat, bidang garapan sejarah kota ialah problema sosial. Perkembangan ekologi, termasuk di dalamnya masalah kepadatan penduduk, mobilitas horisontal, dan heterogenitas dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Di antara masalah itu ialah disparitas dan pemisahan pemukiman secara ekonomis dan sosial, ketimpangan demografis, dan masalah lingkungan fisik, sosial, dan psikologis. Mengenai yang terakhir ini hampir-hampir perhatian peneliti tidak pernah ditujukan. Seperti diketahui, kepadatan penduduk semacam yang terjadi di setiap kampung dengan nama Kauman di kota mana saja di Jawa selalu terjadi. Lingkungan kampung dalam kota yang sepadat itu tentu saja menimbulkan suasana psikologis tertentu bagi penghuninya. Dengan membandingkan perkembangan lingkungan fisik dan perkembangan lingkungan sosial-manusiawi kita akan mendapatkan bahwa ada perbedaan psikologis antara generasi tua dan muda di kampung yang sama. Kampung Kauman di Yogyakarta yang melahirkan seorang KHA. Dahlan di masa lampau tentu berbeda secara psikologi lingkungannya dengan kampung yang sama. sekarang.<sup>12</sup> Dengan sejarah lisan kiranya masalah ini akan dapat dikerjakan. Masalah-masalah sosial apakah yang dapat timbul dari lingkungan kota? Jelas bahwa adanya kampung-kampung dengan standard lingkungan yang rendah terdapat di mana saja di kota-kota Indonesia. Kapan perkampungan **slum** itu mulai ada? Masalah sosial apa yang ditimbulkan? Selain masalah yang termasuk dalam

kategori kemasyarakatan tentu \*masih banyak lagi masalah ekologis, seperti soal pembuangan air, sampah, kepadatan lalu-lintas, yang semuanya dapat menjadi bidang kajian sejarah. Mengapa kota-kota gagal untuk menyenangkan warganya? Kegagalan warga kota untuk memanusiawikan kota nampak dalam perkembangan kota yang tak terkendalikan lagi. Dalam penelitian sejarah tentang kota Philadelphia San Bass Warner, Jr., *The Private City*, meletakkan kesalahan pada privatisme orang Amerika yang selalu ingin mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.<sup>13</sup>

Sejalan dengan transformasi sosial-ekonomis terdapat problema sosial yang sangat banyak. Pergeseran antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat merupakan contoh yang mudah. Ketika golongan bangsawan mengalami kemunduran, baik karena menurunnya pendapatan secara natural maupun karena reformasi administrasi, proses pemiskinan bangsawan tidak lagi terhindarkan. Di Madura, misalnya, kasus kejahatan sosial dari yang ringan sampai yang memalukan muncul dalam laporan-laporan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 ketika golongan bangsawan tidak lagi memegang pemerintahan. Adanya kerusuhan di kota akibat bermacam-macam ketegangan antara orang asli dengan pendatang, antara orang pribumi dengan orang asing, dan antara kampung satu dengan lainnya banyak dijumpai. Demikian juga berita-berita di surat-kabar sensasional mengenai perkelahian antara kelompok-kelompok bawah-tanah sering kita dengar. Masalah prostitusi, pengangguran, pengedaran obat-obatan terlarang, dan sejenisnya yang sumber-sumbernya dapat dicari dalam arsip kepolisian dan badan lain yang mengurus sama sekali belum digarap oleh sejarawan. Tindakan-tindakan kekerasan banyak terjadi di kota, baik secara individual maupun berkelompok. Dalam perkembangan terakhir gejala kekerasan itu semakin menonjol, dan hanya sebuah sejarah kriminalitas akan dapat mengungkapkan itu. Sebuah penulisan dari polisi atau kriminologis. Di Amerika penelitian sejarah kriminalitas sudah banyak dikerjakan.<sup>14</sup>

Demikian pula terjadi problema sosial dalam sistim sosial. Masalah yang banyak menjadi perhatian sejarawan, terutama sejarawan Amerika, ialah kekuasaan seorang boss di kota-kota besar. Seorang boss biasanya menjadi tulang punggung bagi sistim kepartaian di kota itu, menjadi pelopor bagi pembangunan kota, menjadi pemberi pekerjaan bagi banyak warga kota, tetapi juga sering sekaligus menjadi pelindung dari suatu tindak korupsi atau kejahatan yang terorganisir. Lyle W. Dorsett, misal-

nya, menulis **The Pendergast Machine**<sup>15</sup> yang mengungkapkan **boss** Pendergast yang menguasai Kansas City, Missouri, dan berhasil membangun kota itu. Ia juga yang berhasil memunculkan Harry Truman dalam politik. Akhir riwayat dari keluarga Pendegast sama dengan akhir riwayat banyak **boss** yang lain, yaitu masuk penjara karena adanya perbaikan-perbaikan dalam sistim kota. Barangkali untuk Indonesia tidak banyak yang melihat bahwa di setiap kota sebenarnya selalu ada semacam **boss** atau **cukong** yang dalam banyak hal mirip dengan kegiatan **boss** di Amerika. Tentu sangat sulit untuk mengadakan penelitian mengenai percukongan itu, karena sifatnya yang rahasia. Namun dengan terbukanya berkas-berkas pengadilan, laporan pajak, dan kesaksian-kesaksian akan banyak yang dapat ditulis.

Kelima, bidang garapan sejarah kota ialah mobilitas sosial. Kita sudah menyaksikan adanya kemajuan dari golongan kelas menengah pribumi pada awal abad ke-20 ini, tetapi tidak seorang sejarawan pernah meneliti mengenai bangkitnya kelas itu secara kuantitatif. Andaikata catatan-catatan tentang pendapatan yang dapat diukur dari banyaknya pajak yang dibayarkan tersedia, catatan dalam lalu-lintas uang pada Bank, catatan mengenai pekerjaan warga kota, dan hasil-hasil dari sensus penduduk kota dapat diperoleh, tentu akan banyak yang dapat diungkapkan. Sementara catatan kuantitatif tidak mudah didapat, perkembangan kelas menengah nampak dalam gaya-hidup. Di Kota Gede, Yogyakarta, misalnya, bangunan-bangunan yang didirikan pada awal abad ini menunjukkan naiknya kaum pedagang pribumi. Demikian juga di kota-kota lain selalu ada kelompok pribumi yang secara bersama seluruh kampung, seperti Laweyan di Surakarta, mengalami mobilitas sosial. Indikator dari mobilitas sosial kadang-kadang dapat dilihat dalam jumlah **haji** yang ada di suatu tempat. Dalam pernyataan budaya, golongan kelas menengah juga mengalami perkembangan. Dapat dibayangkan bahwa kelas menengah terpelajar atau kelas menengah **santri** mempunyai pernyataan budaya sendiri-sendiri.

Kalau masih mungkin didapatkan, daftar pelanggan majalah dan surat kabar akan memberi petunjuk mengenai mobilitas sosial. Dalam keadaan semuanya tidak tersedia, untuk meneliti mobilitas sosial menyurut tiga generasi ke belakang kiranya dapat dikerjakan dengan mengedarkan kuesiner. Tentu saja ini menyangkut masalah metode penelitian sosiologis yang cukup rumit. Kesulitan semacam ini tidak terdapat di Amerika. Di negara yang sudah maju seperti itu, setiap kota mempunyai **city**

**directory** yang merupakan buku induk warga kota yang memuat semua data yang diperlukan untuk setiap orang dalam kota. Jika seseorang warga kota pindah, selalu ada keterangan di dalamnya. Dan mobilitas sosial tiap-tiap penduduk, termasuk pendapatan dan pekerjaannya, termasuk dalam buku itu.

Demikian Stephan Thernstrom menulis **Poverty and Progress : Social Mobility in a Nineteenth Century City.**<sup>16</sup>

Dengan menggunakan penghitungan melalui komputer, mobilitas sosial dari sejumlah besar sample dapat dihitung.

Sekalipun untuk Indonesia rupanya tidak mungkin semacam ini dikerjakan, tetapi tidak tertutup kemungkinan pendekatan lainnya.

Kiranya dengan peralatan teoritis dan metodologis yang memadai, kekurangan-kekurangan dalam sumber-sumber sejarah akan dapat diatasi. Sejarah kota sungguh merupakan garis depan dari penulisan sejarah nasional kita.

\* \* \*

## CATATAN

1. Konsep tentang **rural-urban continuum** atau **folk-urban continuum** dan **rural-urban contrast** termuat di antaranya dalam Gideon Sjoberg, **The Preindustrial City: Past and Present** (New York The Free Press, 1965).
2. Distrik Bangkalan, misalnya, yang menjadi tempat ibukota kerajaan Madura-Bangkalan berada di bawah seorang patih yang membawahi 13 **mantri kepala kampung** atau kepala desa yang seorang di antaranya berpangkat **demang** dan menjadi pemuka dari **kepala kampung** yang lain.
3. Lihat misalnya Pauline Dublin Milone, **Urban Areas in Indonesia : Administrative and Census Concepts** (Berkeley : Institute of International Studies, University of California, 1966).
4. H.J. van mook, "Kota Gede". **KT**, XV 1926, 352 400.
5. Nama-nama kampung di kota seperti Yogyakarta kebanyakan masih memakai nama seperti Suronatan, Bugisan, Daengan, Patehan. Juga nama-nama tempat diambil dari nama bangsawan yang tinggal di kampung, seperti Yudonegaran, Wijilan, Secodiningratan.
6. Stephan Thernstrom, "Reflections on the New Urban History", **Daedalus**, 100 : Spring 1971, 359 75.
7. Sam Bass Warner, Jr., **Streets and Suburbs : The Process of Growth in Boston** (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1962).
8. Clifford Geertz, **Peddlers and Princes : Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns** (Chicago : The University of Chicago Press, 1963).
9. Clifford Geertz, **The Social History of an Indonesian Town** (Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1965).
10. Lihat bahasan singkat mengenai kedua buku itu dalam Koentjaraningrat, **Anthropology in Indonesia : A Bibliographical Review** ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975), 204 205.
11. Kenneth A. Lockridge. **A New England Town : The First Hundred Years** (New York W.W Norton & Company, Inc., 1970).

12. Lihat skripsi Ahmad Adaby Darban, 'Sejarah Kauman Yogyakarta Tahun 1900- 1950 : Suatu Studi Terhadap Perubahan Sosial'. (Universitas Gajah Mada, 1980).
13. Sam Bass Warner, Jr., **The Private City : Philadelphia in Three Periods of Its Growth** (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1973).
14. Sebagai contoh, lihat Humbert S. Nelli, "The Italians and Organized Crime", dalam Alexander B. Callow, Jr. (ed.), **American Urban History : An Interpretive Reader with Commentaries** (New York : Oxford University Press, 1973).
15. Lyle W. Dorsett, **The Pendergast Machine** (New York : Oxford University Press, 1968).
16. Stephan Thernstrom, **Poverty and Progress : Social Mobility in a Nineteenth Century City** (New York : Atheneum, 1970).

\* \* \*

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 611/F I. IV/T 82**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR SEJARAH LOKAL  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1982/1983 adalah mengadakan Seminar Sejarah Lokal di Denpasar Bali.
  - b. bahwa untuk dapat tercapainya tertib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Seminar Sejarah Lokal".
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1982;
    - c. Nomor 237/M Tahun 1978;
    - d. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
    - b. Nomor 0110/P/1982 tanggal 29 Maret 1982;
  3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1982/1983 Nomor 472/XXIII/3/1982 tanggal 11 Maret 1982.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : a. Membentuk "Panitia Seminar Sejarah Lokal" yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Panitia Seminar" dengan tugas mempersiapkan, melaksanakan serta menyelesaikan Seminar Sejarah Lokal di Denpasar Bali;
- b. Panitia Seminar terdiri dari :
1. Panitia Pengarah;
  2. Panitia Penyelenggara.
- KEDUA** : Susunan/keanggotaan serta kedudukan dalam kepanitiaan "Panitia Seminar" tersebut pada pasal "Pertama" seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : "Panitia Seminar" harus telah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Agustus 1982, dan mewajibkan Ketua Panitia menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan seminar, hasil seminar serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan;
- KEEMPAT** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini dalam rangka penyelenggaraan seminar dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam Daftar Isian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 11 Maret 1982 nomor 472/XXIII/3/1982;
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1982.

DITETAPKAN DI: JAKARTA  
PADA TANGGAL: 12 AGUSTUS 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A.n.b.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

**PROF. DR. HARYATI SOEBADIO**

NIP. : 130 119 123

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 12 Agustus 1982  
NOMOR 611/F I.IV/T 82

**Daftar Susunan/Keanggotaan Panitia Seminar**

**Pelindung** : Prof. Dr. Haryati Soebadio

**Penasehat (teknis/  
administratif)** : – Drs. Bastomi Ervan  
– Dr. S. Budhisantoso

**Panitia Pengarah**

**K e t u a** : Dr. T. Ibrahim Alfian

**Sekretaris** : Drs. A.B. Lopian

**Anggota** : – Dr. Taufik Abdullah  
– Dr. Kuntowijoyo  
– Drs. F.A. Sutjipto  
– Drs. Abdurrachman Surjomihardjo  
– Drs. R.Z. Leirissa. MA  
– Drs. Bambang Sumadio

**Panitia Penyeleng-  
gara**

: Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDUYAAN  
A.n.b.  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

**PROF. DR. HARYATI SOEBADIO**

---

NIP. : 130 119 123

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretariat Negara
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda
7. Sekjen Dep P dan K.
8. Inspektur Jenderal Dep P. dan K.
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K.
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K.
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K.
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P dan K.
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P dan K.
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
19. Ditjen Anggaran
20. Ditjen Pajak
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan
22. BAPPENAS
23. Ketua DPR—RI
24. Komisi IX DPR—RI
25. Pengurus Pusat KORPRI
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

## DAFTAR PESERTA / PEMBAWA MAKALAH.

No.	Nama	Judul Makalah
1.	Dr. S. Budhisantoso	Arti Pentingnya Sejarah Lokal dalam Pembangunan Nasional.
2.	Dr. Taufik Abdullah	Sejarah Lokal, Kesadaran Sejarah dan Integrasi Nasional
3.	Dr. Kuntowijoyo, MA.	Kota Sebagai Bidang Kajian Sejarah
4.	Drs. Muchlis	Sejarah Lokal (Tantangan dan Harapan)
5.	Dr. Onghokham	Stratifikasi Sosial dan Kepemimpinan.
6.	Dr. T. Ibrahim Alfian	Sejarah Lokal dalam Kurikulum Universitas, Sebuah Catatan Ringkas
7.	Drs. Munandjar Widiyatmiko	Kepemimpinan dalam Struktur Masyarakat Lio di Nusa Tenggara Timur.
8.	Drs. Frans Hitipeuw	Kerajaan Ternate dan Tidore di Abad ke XIV
9.	Dr. F.A. Sutjipto	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan di Daerah Surabaya. Suatu Studi Perbandingan antara Masa Sebelum dan Sesudah Pertengahan Abad ke-18.
10.	Dra. Mona Lohanda	"Tuan Bek" dan "Inlandsche Kommandant Batavia"
11.	Drs. Mardanas Safwan	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal di Sumatera Barat
12.	Prof. Dr. Ngurah Bagus	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinannya.
13.	Drs. Suyatno	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal di Surakarta.
14.	Drs. H. Ramli Nawawi	Peranan Madrasah pada Masa Penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan.
15.	Drs. A.Á. Gde Putra Agung	Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi Sosial di Bali.

- 
16. Drs. Ishaq Thaher Pendidikan dan Perkembangan Sosial Ekonomi di Bukittinggi Periode 1900 - 1942.
  17. Drs. Rusdi Sufi Pendidikan Barat dan Modernisasi Pendidikan Agama di Aceh.
  18. Dra. Marleily Asmuni Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi Sosial di Daerah Riau pada Awal Abad XX.
  19. Drs. Muhammad Ibrahim Gerakan Protes Masyarakat Pedesaan di Aceh terhadap Militerisme Jepang. Kasus Bayu dan Pandrah.
  20. Drs. Soegijanto Padmo Aspek Historis dari Pembangunan Pedesaan di Jawa Tengah.
  21. Drs. R.Z. Leirissa, M.A. Pergolakan di Paulohy (Teluk Eldaputih) 1836 - 1837.
  22. Drs. Suhartono "Wong Cilik" Problema dan Dinamika Surakarta Abad 19.
  23. Drs. Sediono M.P. Tjondronegoro Membangun Prasarana untuk Merangsang Penulisan Sejarah Lokal demi Integrasi Nasional.
  24. Dra. A.M. Djuliaty Surojo Dari Subsistensi ke Perdagangan Desa Pantai Maribaya : 1950-1978
  25. Drs. Ma'moen Abdullah Stratifikasi dan Pola Kepemimpinan Lokal di Daerah Sumatera Selatan.
  26. Drs. Anhar Gonggong Sulawesi Selatan dan Komunikasi; Dalam Rangka Proses Integrasi Bangsa Melangkah ke pemahaman diri melalui Sejarah.
  27. Dr. Nico S. Kalangie Masalah Komunikasi Antar budaya
  28. Drs. J.R. Chaniago Penduduk Bukittinggi sebelum Perang Sebuah Kerangka Studi.
  29. Drs. F.E.W. Parengkuan Orang Manado Sebuah Gambaran Singkat.
  30. Drs. Suwardi M.S. Komunikasi antar Daerah antar Suku Bangsa dan Pembauran di Daerah Riau.
  31. Drs. Helius Syamsuddin Sumbawa Hubungan antar Pulau dan Interaksi antar Suku Bangsa.

32. Drs. Nazief Chatib dan Ir. Pangaduan Lubis Latar Belakang Sejarah dan Interaksi Sosial Peranan Mandailing dan Minangkabau dengan Suku Bangsa Melayu di Medan.
33. Dr. Sriwulan Rujianti Mulyati Sastra dan Sejarah Lokal.
34. Dr. Ayatrohaedi Karya Sastra sebagai Sumber Sejarah.
35. Dr. Edi S. Ekadjati Sumbangan Karya Sastra Sejarah terhadap sejarah Lokal di Indonesia
36. Drs. Suripan Sadi Hutomo Sastra Sejarah dan Penulisan Sejarah Lokal.

## DAFTAR PENINJAU SEMINAR SEJARAH LOKAL

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Dr. Astrid S. Susanto    | – B A P P E N A S.   |
| 2. Dr. R. P. Suyono         | – Kepala Pusat Peninggalan Arkeologi Nasional.   |
| 3. Drs. Uka Tjandarasmita   | – Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.                         |
| 4. F. X. Sutopo             | – Direktur Kesenian,   |
| 5. Drs. Amir Sutaarga       | – Direktur Permuseuman,  |
| 6. Arimurthi, SE.           | – Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,                         |
| 7. Dra. Sumartini           | – Kepala Arsip Nasional RI,  |
| 8. Dr. S u k m o n o        | – Proyek Pemugaran Candi Borobudur.  |
| 9. Drs. Djoko Sukiman       | – Universitas Gajah Mada,  |
| 10. Drs. I. Made Sutaba     | – Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, Kanwil Departemen P dan K Propinsi Bali. |
| 11. Drs. A. Adaby Darban    | – Universitas Gajah Mada,  |
| 12. Drs. H. Bambang Suwondo | – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional.  |
| 13. Drs. Djenen M.Sc.       | – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,  |
| 14. Drs. Sugiarto Dakung    | – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,  |
| 15. Sutrisno Kutoyo         | – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional.  |
| 16. Zainuddin Ayub          | – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,  |
| 17. Drs. S u l o s o        | – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,  |
| 18. Drs. R. Sukamto         | – B A P P E N A S,   |
| 19. Drs. Tashadi            | – Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,  |
| 20. Sudiardjo, SH.          | – Kepala Bagian Perencanaan Ditjen. Kebudayaan,  |
| 21. Sunartik Sukotjo        | – Bendaharawan Direktorat Jenderal Kebudayaan,   |
| 22. Firdaus Burhan          | – Swasta,  |
| 23. Drs. Suwadji Syafei     | – Universitas Indonesia.   |

# LAPORAN PANITIA PENGARAH SEMINAR SEJARAH LOKAL DI DENPASAR

## IV

31 Agustus – 4 September 1982

Setelah mengikuti pembicaraan-pembicaraan selama 4 hari, kami menyatakan kegembiraan karena partisipasi yang penuh dari semua peserta seminar. Kegembiraan ini bertambah karena walau pun waktu persiapan relatif terbatas, dan sidang-sidang berjalan dari pagi sampai jauh malam, kegairahan dalam berdiskusi tetap tinggi.

Disamping itu selama seminar, terjalin hubungan profesi dan persahabatan yang lebih akrab antara tenaga-tenaga sejawan dari berbagai daerah. Barangkalai tak perlu kami tegaskan lagi bahwa salah satu suasana yang akan dapat meningkatkan kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan ialah terjalinnya komunikasi yang baik antara para pendukungnya.

Seminar ini selanjutnya ternyata dapat memperkenalkan tenaga-tenaga baru yang selama ini belum tampil ke dalam pertemuan yang bertaraf nasional. Disamping itu yang lebih mengembirakan lagi ialah bahwa seminar ini sesuai dengan yang diharapkan, telah menjadi forum bagi dikemukakannya pengetahuan yang lebih mendalam dan akrab tentang berbagai aspek dari dinamika masyarakat di beberapa daerah di tanah air kita.

Pokoknya seminar ini bukan saja kami rasakan telah mencapai sasaran yang dikehendaki oleh proyek, tetapi juga nampaknya memperkaya cakrawala intelektual para peserta.

## UMUM

1. Studi sejarah lokal merupakan pengenalan yang lebih intim dengan dinamika masyarakat setempat, sehingga memungkinkan kita untuk mempertemukan secara strategis hasrat dan rencana pembangunan nasional dengan realitas setempat.
2. Dalam rangka integrasi nasional, studi sejarah lokal dapat mengidentifikasi potensi-potensi nasional yang terbaik yang memungkinkan pemanfaatan secara optimal, potensi masyarakat lokal dalam konteks pembangunan nasional secara keseluruhan.

3. Dilihat dari segi akademis, studi sejarah lokal bisa mempercepat pengindonesiaan (indigenization) dari pada ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian teori-teori dari ilmu-ilmu sosial berdasarkan generalisasinya atas realitas Indonesia, sehingga dapat membantu penyusunan konsep-konsep ilmu sosial dengan masyarakat kita. Dalam usaha "indigenization" dari pada konsep-konsep ilmu sosial, maka sejarah adalah disiplin yang sangat strategis, karena sejarah sangat peka tidak hanya terhadap pola perilaku manusia, tetapi juga terhadap interaksi antara manusia dengan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kekuasaannya.

### **KESAN—KESAN**

1. Seminar sudah lebih terarah bila dibandingkan dengan seminar-seminar sejarah sebelumnya.
2. Walaupun membicarakan sejarah lokal, permasalahan seminar didasari wawasan integrasi nasional.
3. Seminar ini memberikan kemungkinan kepada Proyek IDSN untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penelitian dan penulisan sejarah di daerah-daerah, sekaligus memberi kemungkinan kepada sejarawan lokal menguji hasil penelitiannya dengan rekan-rekannya sebelum diterbitkan dan disebarluaskan.
4. Memberi gagasan-gagasan baru kepada para pengajar sejarah pada waktu menyusun silabus.
5. Merupakan langkah permulaan yang menggembirakan karena makalah-makalah yang disampaikan tidak lagi terbatas pada deskripsi saja.
6. Merupakan sarana untuk talent scouting dari potensi penulisan sejarah di daerah.

### **BEBERAPA KELEMAHAN**

Dengan menyadari bahwa masa persiapan sangat singkat, panitia pengarah mencatat beberapa kelemahan dalam pembuatan makalah :

1. Ketajaman dalam perumusan permasalahan masih kurang.
2. Karena kurang tajam dalam perumusan permasalahan ini, maka seleksi dari fakta-fakta yang relevan belum memuaskan.
3. Konsep-konsep ilmu sosial belum dikuasai dengan baik.
4. Adanya kelemahan dalam metodologi penelitian dan penulisan.

5. Kekurangan imajinasi dalam menanggapi TOR, yang dicerminkan pada pemilihan judul makalah yang harus mengikuti judul-judul TOR.
6. Sistematik dalam penyusunan argumen dengan fakta-fakta relevan perlu ditingkatkan.
7. Akibat dari kekurangan waktu maka **exhaustiveness** dari penggunaan sumber sangat minim.
8. Penggunaan sumber primer masih sangat terbatas.

## SARAN

Berhubung dengan hal-hal yang disebut tadi, maka diusulkan untuk mengadakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Agar supaya makalah-makalah diperbaiki dan dilengkapi untuk diterbitkan kemudian. Untuk melaksanakan maksud ini perlu ditunjuk dewan redaksi yang akan mengadakan seleksi daripada makalah yang dapat diterbitkan.
2. Usaha yang dirintis ini perlu dilanjutkan dengan memberi perhatian kepada daerah-daerah yang belum dijangkau dalam seminar pertama ini.
3. Disamping penyelenggaraan seminar sejarah lokal seperti ini perlu diadakan seminar yang khusus membicarakan metodologi untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan sejarah.

